

Sejarah Sosial

Daerah Lampung

Kotamadya Bandar Lampung



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1984 / 1985

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH SOSIAL DAERAH LAMPUNG KOTAMADYA BANDAR LAMPUNG

Sang Bumi Ruwa Jurai

Tim Peneliti / Penulis :

1. Drs. Tayar Yusuf (Ketua)
2. Drs. Rousman Effendy (Anggota)
3. Sutrisno Kutoyo (Anggota)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1984 / 1985

SAMBUTAN **DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk menantisia memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebangsaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Juni 1984

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan pesejarahan perihal Sejarah Masyarakat (Sejarah Sosial) di seluruh wilayah Indonesia.

Penulisan Sejarah Sosial dimaksudkan ialah sejarah sekelompok manusia dengan ciri-ciri etnis tertentu yang berperan sebagai pendukung kebudayaan lokal; misalnya masyarakat Betawi di DKI Jakarta. Keadaan masyarakat setiap daerah selalu menjalani perubahan dan pertumbuhan. Karena adanya proses sosialisasi, yang merupakan modal berharga dalam usaha mewujudkan upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka.

Dengan tersusunnya Sejarah Sosial tiap-tiap daerah dari wilayah Indonesia untuk mendapatkan gambaran tentang kehidupan masyarakat tersebut; seperti keadaannya pada masa kini, dengan latar belakang masa lampau, yang memberikan proyeksi pada masa datang.

Di samping itu Sejarah Sosial juga sangat berguna bagi pengambilan kebijaksanaan pada berbagai bidang. Selanjutnya pengetahuan sejarah sosial akan membantu menumbuhkan sikap saling mengerti, baik dalam pergaulan untuk masyarakat di Propinsi ataupun dalam skala nasional, yang merupakan modal utama bagi terciptanya kerukunan dan kesejahteraan hidup di masyarakat itu sendiri yang diperlukan untuk pembangunan.

Adapun tujuan penulisan Sejarah Sosial itu sendiri untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat tertentu serta melengkapi bahan untuk penulisan sejarah daerah dan sejarah nasional yang mencakup sektor lokasi, demografi, pola pemukiman, permulaan hidup, kebahasaan, sistem kekerabatan, keagamaan maupun unsur pembangunan.

Dengan demikian proses sosialisasi sebagai kejadian sejarah akan memberikan kesadaran terbinanya jiwa kebangsaan terutama pada generasi muda mengenai kesinambungan sejarah bangsa dalam rangka pembinaan bangsa.

Jakarta, Juli 1984

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

DAFTAR ISI

Halaman

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN	iii
PENGANTAR	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR ISI	ix
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang permasalahan	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.3 Metode Penelitian	5
Bab II Profil Daerah Penelitian	7
2.1 Geografis	7
2.2 Topografi	11
2.3 Kependudukan	12
2.4 Pemerintah	15
2.5 Tata Lingkungan Pemukiman	17
2.6 Pendidikan	19
Bab III Sejarah Kota Bandar Lampung	21
3.1 Perubahan Nama	22
3.2 Catatan Kronologis	23

3.3	Awal Sejarah Telukbetung	24
3.4	Tanjungkarang-Telukbetung menyatu	28
3.5	Urbanisasi dan teori model ekologi Sosial	35
3.6	Spekulasi dan Pemilik Tanah Absentee	43
Bab IV	Sejarah Sosial Budaya	48
4.1	Bandar Lampung : Kota Nasional ke II	49
4.2	Agama dan Kemasyarakatan	56
4.3	Suku Asli Lampung	60
4.4	Sejarah Asal-usul	65
4.5	Dari Asia Selatan	69
4.6	Struktur Sosial dan Sistim Budaya	71
4.7	Aksara (huruf) Lampung	77
4.8	Benda-bendar Budaya dan Alat-alat Upacara	80
4.9	Mahkota Pengantin	83
PENUTUP	86	
DAFTAR KEPUSTAKAAN	87	
LAMPIRAN	92	

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Tugu Kemerdekaan RI	xi
2. Makam Pahlawan	36
3. Kantor Wali Kotamadya Bandar Lampung	36
4. Gubernuran Propinsi Lampung	37
5. Kantor Gubernur/KDH Propinsi Lampung	37
6. Pakaian Adat Lampung Pubian	50
7. Gedung Museum daerah Lampung	50
8. Rumha Adat Lampung Pubian	51
9. PEPADUN (Kursi Adat) Lampung Pubian	51
10. Tempat Sirih – Adat Lampung Pubian	52
11. PEPADUN (Bentuk lain) Lampung Pubian	53
12. Peta Lingkungan Bahasa dan Adat Lampung	72
13. Bentuk Aksara/huruf Lampung	79
14. Benda-benda Budaya/Alat-alat upacara Lampung	82
15. SIGER Mahkota Pengantin	85
16. PETA Kotamadya Bandar Lampung	94

Penyunting:

1. DR. Kuntowijoyo.
2. DR. F.A. Sutjipto.

Gambar kulit oleh :
M.S. Karta

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pertumbuhan dan Perkembangan daerah Lampung sejak beberapa tahun terakhir ini terutama dalam hal pertambahan penduduk yang pesat serta keanekaragaman suku-suku yang tinggal di daerah ini, adalah merupakan suatu hal yang menarik bagi penelitian ini. Sejak 2 – 3 dekade terakhir ini perkembangan penduduk daerah ini mencapai angka 5,23% per tahun, yang terdiri dari 2,35% kenaikan secara alami (kelahiran) dan 2,88 adalah dari transmigrasi/migrasi.

Di Kotamadya Bandar Lampung sekarang ini jumlah orang Lampung asli hanya sebagian kecil saja, yakni lebih kurang 1/4 bagian atau berkisar sekitar 25% saja dari jumlah seluruh penduduk. Sedangkan yang tiga perempat bagian lainnya (75%) adalah mereka yang berasal dari luar daerah Lampung yang terdiri dari banyak suku dari Sabang ke Jayapura.¹⁾

Keadaan sosial seperti ini tentunya tidak terlepas dari kasus-kasus sebelumnya dan juga dari pengaruh situasi dan

1) Ditjen. Kebudayaan Departemen P dan K, *Monografi Daerah Lampung* (Jakarta : Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, 1976) hal. 13.

kondisi sosial di luar batas daerah ini dengan aneka warna permasalahannya.

Pertambahan penduduk yang pesat di daerah ini, di mana Lampung telah populer pula dijuluki dengan Jawa Utara yang dikarenakan derasnya arus kedatangan orang-orang dari luar propinsi ini, adalah pula menimbulkan beberapa estimet bagi masa depan daerah Sang Bumi Ruwa Jurai ini.

Dalam hal ini penting dipelajari secara periodik tentang perubahan-perubahan atau perkembangan di masa lampau. Penelitian ini mencoba melihat peristiwa dan aspek-aspek sosial dalam kurun waktu sekitar tahun 1900 s.d. 1950 sebagai periode utama, di samping itu masa-masa sebelum dan sesudahnya tidak dapat terlepas sama sekali di mana kaitan dan persambungannya tidak dapat terputus, yakni peristiwa hari ini adalah merupakan proses atau kelanjutan dari masa yang lalu, dan peristiwa masa yang akan datang adalah merupakan proses pula dari hari ini.

Khusus kurun waktu tersebut di atas memang mempunyai ciri khusus dan identitas tersendiri pula di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada umumnya dan tidak terkecuali pula masyarakat daerah Lampung, sebagai suatu fase perjuangan kebangkitan Pergerakan Nasional sampai dengan berhasilnya perjuangan tersebut, yaitu mencapai suatu negara merdeka, Republik Indonesia yang berdaulat sendiri terlepas dari penjajahan asing.

Khusus pula bagi daerah Lampung, periode waktu 1900 – 1950 itu merupakan suatu masa yang membawa sejarah tersendiri pula, dan lebih menarik lagi karena daerah ini merupakan daerah yang berpenduduk amat majemuk yang merupakan Indonesia dalam ukuran mini. Di samping itu daerah ini ada-

lah obyek transmigrasi yang pertama, tertua dan terbesar Kepulauan Indonesia.

Transmigrasi pertama dari Jawa ke Lampung yang pada masa kekuasaan Belanda disebut dengan istilah "Kolonisasi" dimulai pada awal abad ke-20 ini yakni pada tahun 1905 sebagai tahun tonggak sejarah awal pertransmigrasian di bumi Indonesia sebagai suatu sistem baru dalam kebijaksanaan di bidang kependudukan ketika itu.

Peristiwa tersebut memberi warna yang jelas bagi keanekaragaman penduduk daerah ini untuk masa-masa selanjutnya sampai pada zaman Indonesia Merdeka serta era Pelita dewasa ini. Malahan merupakan ciri khas masyarakat daerah Lampung yang telah menjadi motto yang diabadikan pada lambang daerah" dengan istilah "Sang Bumi Ruwa Jurai", yang mengandung pengertian bahwa "Lampung dihuni oleh dua macam penduduk, yang terdiri atas penduduk asli dan pedatang yang beraneka ragam, yang semuanya hidup rukun dan bersatu membangun daerah. Pengertian ini berkembang dari makna semula yaitu daerah Lampung yang didiami oleh dua sistem adat dan dialek bahasanya yakni dialek "O" dan berdialek "A". Yang dimaksud dengan yang berdialek "O" yaitu orang Lampung Abung dan Tulang bawang (Pepadun), yang berdialek "A" yaitu orang Lampung Peminggir/Pesisir dan lain-lainnya.

Jadi dengan studi sejarah sosial yang dilaksanakan ini yang untuk tahun ini mengambil lokasi Kotamadya Bandar Lampung, diharapkan akan dapat menggambarkan dengan jelas peristiwa-peristiwa sosial tersebut dengan berbagai aspek sosiologis pula yang merupakan spesifiknya daerah ini. Kejadian-kejadian interaksi sosial tersebut tentu berkaitan dengan situasi sosial daerah ini. Secara keseluruhan ataupun sebagian as-

peknya saling memberi pengaruh tertentu terhadap kehidupan sosial lainnya, termasuk berkaitan pula dengan mobilitas penduduk, konflik dan intergrasi, dan sebagainya.

Dari hal-hal tersebut di atas dapat ditarik permasalahan bahwa : Bagaimanakah dan sejauh mana perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, serta bagaimana pula perkembangan dan pertumbuhan segi-segi lainnya terutama dilihat dalam waktu. Oleh sebab itu penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan sosial dan historis dengan peninjauannya secara kronologis.

Lokasi penelitian untuk periode 1983/1984 ini adalah mengambil tempat di Kotamadya Bandar Lampung, yang merupakan kota terbesar dan pusat pemerintahan serta ibu kota Propinsi Lampung. Kota ini berperan sebagai pusat dinamisasi dan mobilisasi sosial kultural masyarakat daerah Lampung, yang antara lain: (1) Sebagai pusat perjuangan, pendidikan, agama, ekonomi, politik, sosial dan segi-segi lainnya; dan (2) Sebagai pusat pembinaan seni dan budaya (seni tari, nyanyi, adat, upacara) yang merupakan pusat kebudayaan daerah propinsi ini pada umumnya.

1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menunjang usaha pembangunan yang berfungsi sebagai landasan kelanjutan pembangunan itu sendiri, dengan cara menginventarisasi dan melihat pengalaman dari berbagai realitas yang terdapat dalam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat daerah Kotamadya Bandar Lampung.

Dengan studi sejarah sosial kiranya dapat ditangkap secermat mungkin berbagai peristiwa sosial dan kaitannya antara yang satu dengan yang lain dalam kurun waktu tahun 1900

s/d 1950 serta masa-masa sebelum dan sesudahnya pula dalam rangkaian sejarah yang tidak putus.

Jadi dengan tercapainya tujuan penelitian ini sebagaimana dimaksud, maka dapatlah berguna sebagai gambaran atau potret seluruh aspek kehidupan sosial daerah Kotamadya Bandar Lampung dalam waktu, baik waktu lampau, sekarang maupun di masa yang akan datang.

1.3. Metode Penelitian

Untuk mengangkat data dalam penelitian ini maka digunakan metode ilmu sejarah dan sosial dengan memanfaatkan beberapa sumber yang ada, antara lain :

- arsip dan dokumentasi serta berbagai laporan
- surat-surat kabar dan majalah lama dan baru
- artikel-artikel dalam majalah
- penerbitan-penerbitan swasta, yayasan, dan lain-lain
- buku-buku dan bahan-bahan literatur lainnya
- observasi daerah/lokasi tempat serta benda-benda sejarah dengan kritik eksteren/interen
- wawancara mendalam (*depth interview*) dengan para informan yang dianggap mengalami/mengetahui dan mengerti tentang sejarah sosial serta situasi kemasyarakatan dalam masa periode yang dimaksud/periode penelitian ini
- angket dalam memperoleh beberapa bagian data yang diperlukan.

Dalam mendapatkan informan, dilakukan secara berantai dari informan yang satu kepada yang lain. Informan yang pertama didapatkan dari kalangan pejabat instansi pemerintah dan dari tokoh atau para pemuka masyarakat. Sangat disayangkan sebagian dari pada informan yang mengalami kehidupan pada awal abad 20 yang masih hidup sekarang ini sudah dalam keada-

an sangat lanjut usia, fisik dan daya ingatannya sudah lemah/pikun. Namun hal tersebut dapat diatasi dan dibantu dengan mengikuti sertakan para informan yang mengalami kehidupan dalam tahun duapuluhan dan tigapuluhan/yang masih sekitar awal abad ke-20 ini, serta beberapa catatan tertulis yang masih ada, juga dari mengkompromikan/menganalisa keterangan-keterangan beberapa informan/responden lainnya:

BAB II PROFIL DAERAH PENELITIAN

2.1. Geografis.

Kotamadya Bandar Lampung terletak di wilayah Propinsi Lampung bagian selatan, dan merupakan kota terbesar diujung paling selatan Pulau Sumatera ini yang terletak dilingkungan Teluk Lampung.

Dalam peta terlihat lebih kurang serempat batas kota terdiri atas pantai atau laut. Bahkan sebelum perluasan daerah kotamadya ini tahun 1982 yang lalu, sepertiga lebih dari batas kota terdiri atas pantai, sehingga dapat dikatakan Kotamadya Bandar Lampung ini merupakan kota pantai.

Diperkirakan proses petumbuhan kota ini berpangkal dari pelabuhan sebagai titik awal dalam perkembangan Kotamadya Bandar Lampung hingga dewasa ini.

Kondisi dan pula kegiatan perdagangan/perekonomian dalam transportasinya bercirikan orientasi laut (*sea oriented*), sehingga pelabuhan laut (sekarang Pelabuhan Panjang, dan pada waktu dulu yakni Pelabuhan Gudang Agen dan Gudang Lelang) mempunyai fungsi yang menentukan bagi perkembangan aktivitas penduduk serta bagi areal Kotamadya Bandar Lampung ini.

Sebelum tahun 1982 pelabuhan laut berada dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan, tetapi Pelabuhan Laut Gudang Agen dan Gudang Lelang sudah sejak berpuluhan-puluhan tahun yang lalu memang telah termasuk wilayah Kotamadya Bandar Lampung. Setelah perluasan kota pada tahun 1982 yang lalu maka semua pelabuhan laut tersebut berada di dalam wilayah Kotamadya Bandar Lampung, termasuk Panjang dan Srengsem.

Dengan demikian pentingnya fungsi pelabuhan tersebut maka dapat dikatakan berkembang/tidaknya Kotamadya Bandar Lampung tergantung dari berkembang atau tidaknya pelayanan pelabuhan terhadap aktivitas kota yang terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Dengan kata lain pelabuhan laut merupakan faktor yang menentukan perkembangan kota ini pula.

Kotamadya Bandar Lampung sebelum perluasan wilayah pada tahun 1982 itu dibatasi oleh kecamatan-kecamatan sebagai berikut :

- sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Kedaton.
- Sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Panjang dan Teluk Lampung.
- Sebelah timur berbatas dengan Kecamatan Panjang.
- Sebelah barat berbatas dengan Kecamatan Gedung Tataan.

Luas wilayah pada waktu itu lebih kurang 33 km², terdiri atas 30 desa atau 4 kecamatan, yaitu : Kecamatan Teluk Betung Utara, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kecamatan Tanjungkarang Timur, dan Kecamatan Tanjungkarang Barat.

Setelah perluasan wilayah kota pada tahun 1982, maka batas-batas kota menjadi sebagai berikut :

- sebelah utara, berbatas dengan Dati II/Kabupaten Lampung Selatan

- sebelah selatan, berbatas dengan Teluk Lampung.
- sebelah timur, berbatas dengan Dati II Kabupaten Lampung Selatan pula
- sebelah barat berbatas juga dengan Dati II Kabupaten Lampung Selatan, karena areal kota ini memang dilingkari oleh daerah Dati II Kabupaten Lampung Selatan.

Dewasa ini kota tersebut terdiri atas 58 desa/kelurahan atau 9 kecamatan, yaitu : Kecamatan Kedaton, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Telukbetung Utara, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kecamatan Telukbetung Barat, dan Kecamatan Panjang yang luar seluruhnya adalah 169,9 km².

Kotamadya Bandar Lampung selain sebagai kota pelabuhan dan pusat pemerintahan Propinsi Lampung, di dalamnya terdapat fasilitas transportasi yang akan mempercepat hubungan Kota Bandar Lampung dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia, seperti: Jakarta-Palembang dan kota-kota lainnya seterusnya ke utara, maka kelihatan Kota Bandar Lampung sangat strategis.

Fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalam kota ini antara lain :

- Jalan raya yang menghubungkan Kota Bandar Lampung dengan kota-kota disebelah utaranya (misalnya : Kota-bumi, Bukitkemuning, Baturaja, Martapura, Palembang, dan seterusnya ke utara, ke timur arah Metro, Labuhan Maringgai, Sukadana dan lain-lain juga Menggala dan yang sejurusan. Ke barat, terus ke Talangpadang, Kota Agung, juga jurusan Liwa, Krui dan seterusnya.

- Jalan kereta api yang menghubungkan Bandar Lampung dengan Pelabuhan Laut Panjang, dan menuju utara ke Kotabumi, Baturaja, Martapura dan Kertopati (Palembang) serta kota-kota di dalam daerah Sumatera Selatan lainnya.
- Pelabuhan Panjang yang merupakan pelabuhan kapal laut untuk orang dan barang. Pelabuhan ini dibangun bersamaan dengan dibangunnya jalan kereta api, yaitu sekitar tahun 1917 dan 1920.
- Pelabuhan Srengsem dan Bakauheni yang merupakan pelabuhan Ferry lintas Selat Sunda.
- Pelabuhan Laut Gudang Agen dan Gudang Lelang yang merupakan pelabuhan kecil untuk kapal barang/hasil bumi antar pulau dan kumpulan para nelayan.
- Lapangan Udara Branti yang terletak lebih kurang 30 km dari pusat Kota Bandar Lampung, yang menghubungkan kota ini dengan Jakarta atau terus keberbagai kota lain.

Pelabuhan udara Branti ini dibangun dan telah mulai digunakan oleh Belanda sejak sekitar tahun 1941, dan selama Indonesia merdeka telah beberapa kali pula mengalami perbaikan-perbaikan dan perluasan/perpanjangan landasan yang disesuaikan dengan keperluan jenis pesawat yang menggunakan landasan tersebut.

Kotamadya ini merupakan jalur penting yang dilalui oleh jalan raya lintas Sumatera. Dengan demikian Kota Bandar Lampung berfungsi sebagai "kota transito" di Sumatera. Hal ini merupakan unsur atau faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adan perkembangan kota yang amat pesat, ditambah pula dengan mengalirnya urbanisasi dari pedesaan propinsi ini dengan amat derasnya.

2.2 Topografi

Kotamadya Bandar Lampung dapat dibagi ke dalam 2 wilayah topografi, yaitu :

Daerah Kotamadya sepanjang pantai Teluk Lampung merupakan daerah landai (dataran rendah) dengan relief 0–5%. Keadaan tanahnya merupakan formasi *paleogen* (tertier) sebagai hasil pegunungan vulkanik yang masih muda dan dalam taraf menuju kematangan.

Daerah pantai merupakan daerah pelabuhan perdagangan, perumahan, dan pelabuhan nelayan dan per Bengkelan kapal. Sebagian lainnya masih merupakan daerah yang masih kosong. Di pinggir pantai juga merupakan tempat bermuara-nya sungai-sungai (bahasa Lampung disebut "wai") yang melintasi daerah Kotamadya Bandar Lampung, antara lain : Wai Balau, Wai Kuripan, Wai Kuala, Wai Lunik, Wai Kupang, Wai Kejadian, Wai Ketagihan, dan Wai Galih. Di antara sungai-sungai tersebut, ada yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, yaitu: Wai Balau dan Wai Kuripan.

Daerah Kotamadya yang lama dapat dikatakan dibatasi oleh dua sungai, yaitu : Sungai Kuripan dan Sungai (Wai) Kuala. Sungai-sungai itu selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk pertanian, juga digunakan sebagai saluran untuk pembuangan air bekas pakai yang *out fall*-nya adalah laut.

Selain daerah landai, wilayah kota ini juga terdiri atas daerah berbukit-bukit atau dataran tinggi. Daerah yang berbukit-bukit ini menyebar di sebagian daerah Talukbetung dan terutama di daerah Tanjungkarang. Bukit-bukit yang ada di dalam kotamadya ini antara lain: Gunung Kunyit, Gunung Sula, Gunung Klutum, dan Gunung Sari, yang membentuk kota ini menjadi berlekuk-lekuk.

Keadaan iklim di Kota Bandar Lampung tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Lampung Selatan, yaitu daerah yang beriklim tropis dengan suhu rata-rata antara 29, s/d 32 derajat Celcius, relatif tinggi, karena letaknya berada di dataran rendah dekat pantai hawa tropis.

Curah hujan daerah ini cukup tinggi, yaitu antara 2000 dan 2500 mm (curah hujan total tahunan), dan curah hujan ini tergantung pada angin musim barat laut yang basah. Selain itu iklim di daerah ini sangat dipengaruhi oleh adanya tekanan rendah dan tinggi yang saling bergantian di dataran sentral Asia dan Australia pada bulan Juli dan Januari pada setiap tahun.

2.3 Kependudukan

Pusat keramaian tempat tinggal (pemukiman) penduduk di Bandar Lampung sampai dengan tahun 1900 dan selama masa pemerintahan Belanda, berada di dua tempat yaitu di Desa Kota Karang, Kampung Palembang, dan Pekulitan untuk daerah Teluk Betung. Untuk daerah Tanjungkarang terletak di Kampung Enggal, Kampung Sawah, dan Kaliawi yang sekarang semakin berdesak-desak.

Desa Kota Karang, Kampung Palembang, dan Pekulitan yang dimaksud, terletak di dekat daerah Pelabuhan (kecil) Gudang Agen dan Pelabuhan (kecil) Gudang Lelang. Penduduknya pada waktu itu sebagian besar terdiri atas orang Banten, demikian juga penduduk Kampung Enggal di Tanjungkarang. Sedangkan di Desa Kaliawi dihuni oleh orang-orang Banten, Minang, Bengkulu serta orang Lampung Peminggir Sukadana-ham.

Kota Telukbetung muncul lebih dulu dari pada Tanjungkarang, karena ditunjang oleh letaknya, yaitu di pinggir pantai dan merupakan daerah pelabuhan.

Di sinilah adanya pusat keramaian pada zaman dulu, yang juga merupakan cakal-bakalnya daerah Kotamadya Bandar Lampung yang sekarang ini telah didiami oleh penduduk sebanyak 277.665 jiwa (sebelum pemekaran kota).

Setelah Telukbetung, maka beberapa puluh tahun kemudian secara berangsur-angsur muncul pula Tanjungkarang menjadi tempat kegiatan pasar yang lama kelamaan merupakan pusat aktivitas transaksi jual beli masyarakat.

Penduduk penghuni Kota Bandar Lampung sebagian terbesar adalah orang-orang pendatang. Sebelum perluasan Kotamadya Bandar Lampung pada tahun 1982, jumlah etnik Lampung asli berada pada ranking ketiga di antara jumlah penduduk masing-masing etnik. Tetapi setelah perluasan kotamadya ini dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 3 tahun 1982 maka jumlah penduduk suku Lampung berada pada ranking kedua. Hal ini dikarenakan tadinya penduduk asli Lampung pada umumnya sebagian besar berdomisili di daerah pinggiran kotamadya ini.

Sebenarnya penduduk Kotamadya Bandar Lampung bersifat sangat majemuk yang banyak sekali macam suku pendatang dari berbagai daerah di Indonesia yang berdomisili di kota ini dengan mata pencaharian yang bermacam-macam ragam punya, sesuai dengan pembawaan dirinya.

Mata pencaharian penduduk Kotamadya Bandar Lampung beraneka ragam, antara lain : penguasa swasta, pegawai negeri, buruh, nelayan, petani, pedagang, bidang industri dan jasa atau bentuk-bentuk lainnya lagi.

Pada awal abad ke-20 ini, pada waktu penduduk pendatang baru memasuki daerah Lampung secara agak ramai, maka dari masing-masing suku pendatang itu mempunyai ciri mata pencahariannya yang berbeda-beda, yang merupakan spesiali-

sasi kecenderungan tiap-tiap suku tersebut pada umumnya dan yang serasi dengan alam pembawaannya, yaitu :

- Suku Banten, pada umumnya sebagai buruh kasar dan petani
- Suku Jawa pada umumnya sebagai pedagang dan petani
- Suku Palembang pada umumnya sebagai pedagang dan petani
- Suku Semendo pada umumnya sebagai petani kopi
- Suku Minang pada umumnya pedagang, ada juga pegawai
- Suku Bengkulu pada umumnya sebagai pedagang dan juga sopir
- Cina pada umumnya sebagai pedagang
- Suku Bugis pada umumnya sebagai nelayan

Sedangkan penduduk suku Lampung sendiri adalah sebagai petani lada, kopi dan karet.

Dari sejarah pembentukan kota ini tadi ternyata proses perkembangan penduduknya selain disebabkan oleh pertambahan alamiah, juga karena perluasan wilayah dan migrasi yang masuk dari luar daerah Lampung. Perkembangan penduduk ini merupakan salah satu indikator perkembangan kota ini pula.

Angka pertambahan penduduk rata-rata kotamadya ini dari tahun 1969 sampai tahun 1977 yaitu sebesar 3,19%. Hal ini berada di bawah perkembangan pertambahan penduduk rata-rata Propinsi Lampung dalam tahun 1971 + 1975 sebesar 4,01% per tahun. Angka pertambahan penduduk yang sangat cepat tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu pertambahan alamiah sebesar 71,72% dan faktor migrasi sebesar 28,28% dari pertambahan total.

total.

Dilihat dari kepadatan penduduk dan penyebarannya, maka terlihat bahwa Kecamatan Tanjungkarang Timur merupakan wilayah kecamatan yang terpadat penduduknya, dengan kepadatan penduduk 151,88 jiwa per hektar. Setelah itu menyusul Kecamatan Tanjungkarang Barat dengan kepadatan penduduk rata-rata 97,22 jiwa per hektar. Sedangkan Kecamatan Telukbetung selatan sebagai kecamatan yang tertua dalam Kotamadya Bandar Lampung mempunyai kepadatan penduduk sebesar 76,46 jiwa rata-rata per hektar.

2.4 Pemerintahan

Pemerintahan Kotamadya Bandar Lampung sebelum tahun 1982 disebut Pemerintahan Kotamadya Tanjungkarang – Teluk betung, berasal dari nama kota kembar atau dua kota yang letaknya bergandengan sehingga menjadi satu yaitu, Kota Tanjungkarang dan Kota Telukbetung.

Sampai dengan tahun 1948 Kotamadya Bandar Lampung masih merupakan kota kecil dengan pusat pemerintahan di Tanjungkarang. Pada masa pemerintahan Belanda, kantor pusat pemerintahannya terkenal dengan sebutan : "Kantor Bangkok" bertempat di Tanjungkarang, karena bentuk bangunan itu memang bengkok membentuk siku dengan patah 90 derajat yang terletak di dekat persimpangan empat jalan, tepatnya di pojok barat bagian utara Jalan Bengkulu di Tanjungkarang sekarang ini.

Dalam kenyataannya sekarang, perkembangan di segala bidang terutama bidang pembangunan wilayah daerah tingkat II kota ini semakin meningkat. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung sebagai ibukota propinsi daerah Tingkat I Lampung juga telah merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan kegiatan pembangunan diwilayah Propinsi Lampung ini.

Oleh karena itu Kotamadya Bandar Lampung mengalami perkembangan pesat di segala bidang kegiatan, antara lain meningkatnya volume perdagangan dan transportasi melalui pelabuhan barang di Panjang dan pelabuhan Ferry di Srengsem serta Bakauheni, juga Pelabuhan Udara Branti yang mengakibatkan bertambahnya volume urusan pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayah Kotamadya Bandar Lampung sebagai pusat kepentingan masyarakatnya.

Dahulu, di samping adanya pemerintahan kecamatan, ada pula pemerintahan negeri dengan seorang kepala negeri yang membawahi beberapa kampung pula. Daerah wilayah kekuasaan kepala negeri ini kadang-kadang meliputi satu atau dua wilayah kecamatan. Kepala negeri dipilih oleh dewan negeri yang terdiri atas tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala-kepala kampung. Sedangkan seorang camat diangkat atau ditunjuk oleh wali kota.

Sekarang pemerintah negeri ini sudah tidak ada lagi sejak dihapuskannya pada tahun 1974, hal mana dengan adanya kepala negeri dan camat, maka sering terjadi *overlapping* atau dirasa terjadi dualisme dalam kepemimpinan. Secara fungsional, kepala negeri sering merasa lebih berwenang dari pada camat, sebab ia dipilih oleh rakyat dan merasa lebih tahu tentang kepentingan negeri, sebab ia sendiri biasanya memang anak negeri itu yang sejak kecil telah hidup di negeri itu. Sedangkan di lain pihak, camat merasa bahwa dia adalah pimpinan yang tertinggi di dalam kecamatan itu, karena ia diangkat dan dipercayai oleh pemerintahan yang lebih tinggi.

Pemerintahan negeri adalah pemerintahan yang tradisional, yang berkembang dari suatu marga, lalu menjadi beberapa marga atau kampung, sehingga menjadi beberapa kampung atau wilayah yang lebih luas lagi. Pemerintahan Negeri ini lebih

banyak diwarnai oleh pemerintahan adat (urusan adat). Sistem pemerintahan negeri ini dihapuskan dengan undang-undang No. 5 tahun 1974.

2.5 Tata lingkungan Pemukiman

Kotamadya Bandar Lampung dilihat dari kondisi bangunannya per kecamatan, ternyata Kecamatan Telukbetung Selatan, Kecamatan Tanjungkarang Timur, dan Kecamatan Tanjungkarang Barat jumlah kondisi bangunan permanen dan semi permanen adalah jauh lebih besar dari pada kondisi bangunan temporer. Hal ini berarti bahwa kecamatan-kecamatan tersebut merupakan bagian kota yang sudah berkembang dengan baik dan terdapat suatu kualitas lingkungan yang tidak rendah. Dilihat dari persentasi daerah yang sudah terbangun relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya.

Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Panjang dan Kecamatan Kedaton dengan jumlah bangunan yang berkondisi darurat (temporer) jauh lebih besar, dan daerah terbangunnya masih sedikit, sehingga dapat dikatakan daerah tersebut merupakan bagian kota yang baru mendapat pengaruh dari pusat kota atau merupakan bagian kota yang baru saja berkembang.

Diketahui, apabila pada suatu kota yang jumlah persentasi kondisi bangunan permanen dan semi permanen jauh lebih kecil dibandingkan dengan persentasi kondisi bangunan temporer, berarti terdapat suatu kualitas lingkungan yang rendah, bahkan menjadikan suatu daerah yang biasanya disebut sebagai *slum area*/(daerah becek).

Lain halnya dengan Kecamatan Telukbetung Utara yang terletak di antara dua pusat kota yaitu Tanjungkarang dan Telukbetung, yang perkembangannya terjadi karena pengaruh kedua pusat keramaian tersebut, sehingga pertambahan penduduknya tidak secepat kedua pusat kota itu.

Kecamatan yang kepadatan bangunannya tertinggi adalah Kecamatan Tanjungkarang Timur, yaitu 17,014 per hektar. Kecamatan Tanjungkarang Barat 13,831 per hektar, Kecamatan Telukbetung Selatan 11,649 per hektar, dan Kecamatan Telukbetung Utara 5,877 per hektar rata-rata. Sedangkan untuk kecamatan dengan kepadatan bangunan rendah, terdapat pada Kecamatan Panjang dan Kecamatan Kedaton, yaitu 0,922 dan 1,217 per hektar.

Pada waktu dulu, sekitar 50 tahun yang silam, tempat pemukiman penduduk Kota Bandar Lampung terpencar-pencar, atau pada waktu itu Kota Telukbetung dan Kota Tanjungkarang masih merupakan dua kota yang terpisah jauh. Tetapi sekarang tidak ada lagi jarak pemisah antara kedua kota tersebut, malahan sudah merupakan satu kota saja, di mana jarak keduanya telah menjadi satu dan bertemu dengan susunan rumah-rumah/bangunan-bangunan yang telah rapat menyatu.

Bangunan tempat pemukiman di kota ini tumbuh bukan saja di sepanjang jalan-jalan besar antara Tanjungkarang – Telukbetung, tetapi juga di tempat-tempat yang tadinya sebelum kemerdekaan merupakan kebun-kebun, ladang dan tanah kosong yang ditumbuhi semak belukar, sekarang telah penuh dengan rumah-rumah permanen dan semi permanen.

Daerah kaum *elite* sudah meluas, bukan saja di sekitar Kampung Enggal, tetapi telah melebar sampai ke daerah Pahoman dan Rawa Laut. Bahkan di sekitar tahun 1980-an muncul kompleks-kompleks perumahan murah (Perumnas), rumah kredit/cicilan BTN atau *real estate* dan lainnya di pinggir kota yang ditata dengan syarat-syarat rumah sehat dan sejahtera, seperti : Kompleks Perumahan Beringin Raya Langkapura, kompleks Perumahan Wai Halim, Kompleks Perumahan Sejahtera di Jalan Pagar Alam/Jalan Pertiwi dan di beberapa tempat lainnya.

2.6 Pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu sektor yang sangat penting dan dapat dikatakan merupakan suatu investasi nasional di dalam mempersiapkan tenaga-tenaga terdidik yang akan menunjang motivasi pembangunan secara murni dan bermutu di dalam berbagai bidang.

Pendidikan di Kotamadya Bandar Lampung pada saat ini terdapat adanya 28 buah Sekolah Taman Kanak-kanak, 126 Sekolah Dasar, 36 Sekolah Lanjutan Pertama, 20 buah Sekolah Lanjutan Atas, dan 7 Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta.

Keadaan dan fasilitas pendidikan sekarang memang sudah jauh berbeda dan lebih maju dibandingkan dengan keadaan dan fasilitas pendidikan di sekitar tahun 1900-an. atau disaat permulaan kemerdekaan Indonesia.

Di masa penjajahan Belanda dulu fasilitas pendidikan di kota ini sangat terbatas sekali, hanya ada beberapa sekolah saja. Itu pun sebagian besar adalah sekolah yang didirikan oleh Belanda dan untuk keperluan Belanda.

Adapun sekolah yang pertama didirikan di kota ini pada tahun 1905 ialah *Vervolgschool* di dekat Gudang Garam Telukbetung, dan HIS (*Hollandsche Inlandsche School*) bertempat di Sumur Batu Telukbetung. Setelah itu, pada tahun 1908 berdiri pula *Vervolgschool* di dekat Pasar Bambu Kuning Tanjungkarang, tahun 1918 berdiri *Europesche Lagere School* di dekat Pasar SMEP sekarang, dan *Arjuna School* yang bertempat di Ra Laut Tanjungkarang.

Pada tahun 1922 berdiri pula Sekolah Taman Siswa dan Taman Dewasa di Durian Payung (di belakang Kantor PLN sekarang). Tahun 1935 berdiri lagi Sekolah *Vervolgschool* di Lungsir, tahun 1940 *Schakelschool* di Durian Payung, dan

pada tahun 1941 berdiri lagi sebuah *Vervolgschool* di Kampung Sawah Tanjungkarang. Juga muncul *Missis School* di belakang Pasar SMEP, Sekolah Agama di Lebak Budi, dan Madrasah Diniyatul Islamiyah (MDI) di Kampung Sawah. Di samping itu, pada tahun 1938 ada juga Sekolah Guru 2 tahun, dan Kursus K.I.L (Keutamaan Istri Lampung), yang sekaligus merupakan nama suatu yayasan pendidikan putra-putra Lampung.

BAB III SEJARAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Nama Kotamadya "BANDAR LAMPUNG" sebagai ganti dari nama lamanya Kotamadya "Tanjungkarang-Telukbetung" secara resmi mulai dipakai semenjak keluarnya Peraturan Pemerintah (PP No. 24) tahun 1983 tertanggal 17 Juli 1983. Semenjak tanggal tersebut, resmilah kota ini memakai namanya yang baru, baik di kalangan pemerintah kota sendiri maupun oleh masyarakat penghuninya dan oleh semua pihak lainnya lagi. Keluarnya PP No. 24 tahun 1983 itu adalah atas usul pemerintah daerah ini sendiri berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya No. 6 tahun 1983 tertanggal 26 Februari 1983.

Sebenarnya keinginan mengubah nama menjadi "Bandar Lampung" tersebut telah ada sejak lama, lebih dari 18 tahun yang lalu di kalangan pemerintah kota maupun oleh para pemuka masyarakat setempat. Gagasan itu mulai dikonkritkan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRGR) kota No. 10 tahun 1965 tanggal 18 Oktober 1965, dan 5 tahun kemudian diperkuat lagi dengan Keputusan DPRGR kota No. 25/DPRD-GR/1970 tanggal 14 Desember 1970.

Perubahan nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung itu telah disetujui dan direkomendasikan pula oleh gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Lampung dengan suratnya No. A/260/I-1/1971 tertanggal 21 Januari 1971 yang ditujukan kepada menteri dalam negeri di Jakarta. Namun nampaknya perwujudannya mengalami ketertunda-tundaan selama lebih dari 12 tahun sampai dengan keluarnya PP No. 24 Tahun 1983 tanggal 17 Juni 1983 itu yang merupakan realisasi peresmian pemakaian nama baru bagi Kotamadya Bandar Lampung tersebut.

3.1 Perubahan Nama

Dulunya sebelum perluasan, nama Kotamadya Tanungkarang—Telukbetung memang sesuai mencerminkan areal lingkungan kota ini, yang terdiri atas Kota Tanjungkarang di satu pihak dan Kota Telukbetung di satu pihak lagi, yang keduanya berjarak ± 5 km, di mana karena pertambahan penduduk/pertumbuhan kota, maka keduanya sekarang telah menyatu merupakan kota kembar.

Tetapi setelah pemekaran kota ini melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 1982 tanggal 30 Januari 1982, maka batas wilayahnya telah berubah dan semakin meluas, yang meliputi pula Kecamatan Kedaton, Kecamatan Panjang, dan Kecamatan Sukarame, yang sebelumnya termasuk di dalam daerah kuasa bupati kepala daerah Kabupaten Lampung Selatan. Untuk menamakan "Rasa" berada *di dalam lingkungan kota* kepada masyarakat dari ketiga kecamatan yang baru masuk kotamadya tadi, tentulah tidak wajar menamakan kota ini dengan nama Kotamadya "Tanjungkarang – Telukbetung – Panjang – Kedaton – Sukarame, karena terasa sangat panjang dan kurang wajar.

Setelah itu, pengertian "bandar" adalah kota pelabuhan, yakni pintu gerbang tempat keluar masuk orang dan barang di suatu daerah. Maka di kota ini terpusat 3 pelabuhan/stasiun, yakni: Pelabuhan Laut Panjang, Pelabuhan Udara Branti, dan Stasiun Kereta Api Tanjungkarang yang merupakan pertantara lalu lintas Palembang dan Jakarta.

Bahkan juga Pelabuhan Srengsem dan Bakauheni yang mencapai jarak ± 92 km, dominasi kepentingannya amat banyak tergantung dari Tanjungkarang sebagai kota transit. Hasil-hasil bumi Lampung dari 3 kabupaten daerah ini sepenuhnya dileluarkan melalui kota ini sebelum dikirim ke berbagai propinsi lainnya terutama ke Jawa. Oleh karena itu memang sebenarnyalah batas kota ini merupakan bandar bagi daerah Propinsi Lampung.

3.2. Catatan Kronologis

Penulisan sejarah pertumbuhan kota ini dapat dimulai sejak tahun 1600-an, dan tanggal yang jelas menjadi salah satu catatan harian pemerintahan pimpinan VOC (Belanda) yaitu 17 Juni 1682, 1) yang pada tanggal tersebut seorang duta (utusan) Kesultanan Banten bernama *Pangeran Aria Dipati Ningrat* memberikan keterangan resmi kepada residen Banten (dari pemerintahan Belanda) William Caaf bahwa "Teloekbetong ditepi laut Teluk Lampung adalah daerah kuasa Banten dan yan ditunjuk sebagai dipati di sana adalah *Temenggung Nata Negara*, yang memerintah sebanyak 3000 orang penduduk (rakyat)".

Keterangan tersebut dilaporkan pula oleh Residen William Caaf kepada atasannya Gubernur Jenderal VOC Cornelis Speelman di Batavia. 2)

- 1). Tanggal 17 Juni ini diambil dan dijadikan oleh Pemda Kodya Bandar Lampung sebagai HARI JADI kota tersebut, yang diperingati setiap tahun dengan berbagai acara peringatan dan pertunjukkan.
- 2) Dagregister VOC 1682 halaman 777-779.

Keterangan ini memberi arti bahwa di tempat tersebut (di Teloekbetong) sehari-harinya telah berkumpul "banyak" orang, yakni sejumlah 3000 penduduk dengan berbagai kegiatan dan transaksinya sebagaimana yang biasa berlangsung di pasar-pasar pada umumnya (kota-kota kecil di tepi laut yang merupakan pelabuhan dagang).

Sebelum itu telah biasa pula disebut dengan kota Suti-Karang, tetapi kemudian lebih lazim dengan nama TELUK karena memang terletak di daerah yang banyak teluknya. (Seorang Koopman bernama Herbertus de Jager menyebutnya dengan "TELLOC" dan Willem Caaf telah menamakannya "TELOEK BETOENG") karena memang kota ini terletak pula dikaki bukit Betung, dan di puncak Bukit Betung tersebut dulunya terdapat pula sebuah danau kecil yang dikelilingi oleh Betung (sejenis bambu yang lebih keras dan lebih besar) lagi pula dengan lebatnya memagari danau tersebut.

3.3. Awal Sejarah Telukbetung

Mengenai cakal bakal Kota Teluk ini malah ada pemuka masyarakat tokoh adat budaya/sejarah Lampung yang berpendapat bahwa kota ini telah mulai terwujud/terbentuk semenjak abad yang ke-15, diawali dengan tempat berkumpulnya pedagang-pedagang yang membawa barang-barangnya melalui aliran sungai dan pantai antara lain pada Pelabuhan Sukamenanti (sekarang bernama Gudang Agen) yang pada masa itu telah merupakan bandar pelabuhan termasuk pula Bandar Balak, Bandar Lunik dan Bandar Teba.³⁾

Agustus 1682 Koopman de Jager menerangkan bahwa Desa Kuripan Pesisir, Perwata dan Suti Karang (Teluk Betung) yang terletak di dalam Teluk Lampung merupakan "pa-

3) Hasil wawancara dengan beberapa respondent, termasuk Abdul Roni Pangeran Marga (ex Pesirah Marga Pertiwi) juga berpendapat demikian.

bean” dan tempat penimbunan lada dari seluruh pelosok daerah Lampung/hasil dari desa-desa yang jauh.⁴⁾

Daerah Lampung ketika itu berada di bawah kuasa Kesultanan Islam Banten, yang sebagai wakil mahkotanya ditunjuk Adipati Wangsa Wiraraja (dipersamakan pangkatnya dengan gubernur) yang membawahi Tumenggung Natanegara (setingkat bupati) yang diangkat dari anak negeri Lampung asli. Dan pada tahun 1682 ini pula saat mana sedang terjadi ”kemelut kekuasaan” pada Kerajaan Banten itu, yakni antara Sultan Agung Tirtayasa (sang ayah) dengan Abdul Nazar alias Sultan Haji (sang anak) yang dimenangkan oleh Sultan Haji atas bantuan dari Belanda, dan pada tahun itu juga Belanda mulai diperbolehkan membeli lada, kopi dan rempah-rempah keperluan Eropa lainnya secara langsung ke daerah Lampung, sebagai imbalan balas jasa dari Sultan Haji kepada VOC. Malah tahun 1684 Belanda telah mendapat hak monopoli perdagangan lada di Lampung, demikian pula di Banten sebagai pusat kerajaan, yakni sebagai penggantian ongkos-ongkos biaya perang sewaktu membantu Sultan Haji melawan pasukan-pasukan ayahnya sejak 2 tahun yang lalu.

Pada tahun 1817 di Telukbetung oleh Belanda telah di-tempatkan seorang asisten residen.⁵⁾ Kemudian karena masih banyaknya terjadi gangguan dan perlawanannya terhadap usaha-usaha dagang Belanda, maka setahun sesudah itu pada tahun 1818 Pemerintah Hindia Belanda menganggap untuk lebih baik mengalihkan pemerintahan sipil kepada seorang Pengusaha sipil militer (*Civielen Militair Gezaghebber*) yang ditempatkan di Telukbetung tersebut guna lebih terjaminnya pengamanan.

4) Dagregister VOC halaman 1045-1048.

5) S. De Graaf dan D.G. Stibbe, *Encyclopedie van Nederlandsch Indie*, Bagian ke II, Tahun 1918 hal. 518-519.

Tahun 1847 kota Telukbetung dijadikan sebagai tempat kedudukan penguasa pemerintahan oleh Belanda.⁶⁾

Tanjungkarang yang jaraknya sekitar 5 km dari Telukbetung, yang terletak di daerah yang ketinggian (\pm 96 meter di atas permukaan laut, Kedaton = 100 m) di sebelah utara pada sekitar awal abad ke-19 ini telah mulai pula tumbuh mengarah menjadi sebuah kota, yakni tempat berhenti sejenak/persinggahan dari para pedagang yang membawa barang-barang dagangan mereka berupa hasil perkebunan termasuk rempah-rempah: lada, kopi, cengkih dan sebagainya dari arah utara, barat, dan timur. Dari utara berasal dari arah Lampung utara, daerah Wai Kanan, Kotabumi dan sebagainya. Sebelah barat dari daerah-daerah sekitar Kota Agung, Talang Padang dan seterusnya dan dari timur datang dari sekitar Labuhan Meringgai, daerah Melinting, Sukadana dan seterusnya, hingga berkembang menjadi sebuah pasar kota yang lebih lengkap dan ramai secara berangsur-angsur dari masa ke masa.

Mula-mula hanya berupa pasar sederhana saja, tempat menjual dan membeli sayur-sayuran dan benda-benda keperluan makanan harian saja, yang berlokasi di daerah sekitar Sempur, kemudian berkembang dan terus berkembang lebih lengkap dan lebih maju.

Pemerintah Belanda melihat kondisi daerah lokasi Tanjungkarang lebih baik dan lebih sehat hawanya, lalu mulai membina ny ke arah menjadi sebuah kota yang teratur. Belanda (VOC) menjadikan Tanjungkarang sebagai daerah tempat tinggal (daerah pemukiman) yang berlokasi terutama di daerah sekitar Enggal sekarang.

Para pejabat dan pegawai-pegawai yang ada pada ranking tinggi tinggal di daerah Tanjungkarang, sedangkan Telukbetung

6) R. Broersma, *De Lampongsche Districten*, (Leiden : E.J. Brill, 1916) hal. 33.

dijadikan sebagai pusat perdagangan serta perkantoran/usaha-usaha lainnya.

Pada tahun 1850 Kota Telukbetung telah dijadikan sebagai pusat pemerintahan Belanda untuk daerah Lampung, dan di sana didirikan pula *redoute* berupa bangunan atau benteng-benteng pertahanan.⁷⁾

Jauh sebelum itu yakni pada dekade ke-3 dan 4 abad ke-19 itu Du Bois yang menduduki jabatan asisten residen, malah merasa perlu untuk mengalihkan ibukota Kresidenan ketika itu dari Telukbetung ke Tanjungkarang, disebabkan karena lingkungannya yang sehat dan nyaman hawanya.⁸⁾ dan Du Bois telah mulai berfikir kearah pembinaan kedua kota tersebut, yang pada saatnya kelak akan menjadi satu/menyatu.⁹⁾

Di Tanjungkarang saja (di luar Telukbetung) pada tahun 1914 telah tinggal 180 orang Eropa, 314 orang Cina di samping beberapa ribu penduduk bumi putra.¹⁰⁾ Pada masa-masa selanjutnya kedua kota ini terus berkembang dengan peranannya masing-masing.

Dengan *Staatsblad* No. 70/1873 yang membagi Keresidenan Lampung menjadi 6 *afdeeling*, maka Telukbetung adalah satu diantara 6 *afdeeling* itu dengan ibukotanya juga Telukbetung. Setelah 7 tahun kemudian, lalu diubah melalui *Staatsblad* No. 88/1880 yang menetapkan bahwa *Afdeeling* Telukbetung dengan ibukotanya Tanjungkarang.

-
- 7). S. De Graaf dan D.G. Stibbe, *Loc. cit.*
 - 8). R. Broersma, *Op.cit.* halaman 34.
 - 9). J.A. Du. Bois pernah menjadi Asisten Residen bagi daerah Tulangbawang yang berkedudukan di Menggala, kemudian pindah ke Bumi Agung. Tahun 1829 Lampung merupakan daerah Keresidenan yang berdiri sendiri, dan J.A. Du Bois menjadi Residennya yang pertama berkedudukan di Terbanggi. Tahun 1834 Du Bois meninggal dunia ketika perang melawan Raden Imba (ayah Raden Intan) di daerah Rajabasa sekitar Kalianda/Lampung Selatan.
 - 10). R. Broersma, *op. cit.* halaman 273.

Kebijaksanaan ini nampaknya merupakan suatu kebetulan yang banyak membawa faktor “luck” (kemujuran) karena 3 tahun kemudian pada tahun 1883 Kota Telukbetung porak poranda tenggelam ditelan gelombang laut besar akibat meletusnya Gunung Krakatau yang terkenal itu di Selat Sunda. Peristiwa ini pula yang kemudian merupakan salah satu sebab hingga Tanjungkarang lebih cepat berkembang.

Tanjungkarang terletak di daerah yang ketinggian yang mencapai sekitar 100 meter diatas permukaan laut.

Selanjutnya terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1912 dengan *Staatsblad* No. 7746/1912 Kota Telukbetung dijadikan sebagai ibukota Keresidenan Lampung.¹¹⁾ sedangkan kedudukan kepala *Onderafdeeling* Telukbetung yang daerahnya cukup luas pula di sekitar Teluk Lampung adalah tetap Tanjungkarang, yakni bagian dari Keresidenan Lampung itu.

3.4. Tanjungkarang-Telukbetung Menyatu

Kota Telukbetung dan Tanjungkarang yang telah mulai menjadi kembar tersebut dikepalai oleh seorang *asisten demang*, yang tunduk kepada *Hoofd Van Plaatselijk Bestuur* (kontroler BB) yakni kepala *Onderafdeeling* Telukbetung di Tanjungkarang. Sedangkan pembiayaannya sehari-hari ketika itu ditanggung oleh satu badan Dana yang diberi nama *Plaatselijk Fonds* (Dana-dana setempat).

Di masa kekuasaan Jepang, Kota Tanjungkarang Telukbetung dipimpin (di kepalai) oleh seorang bangsa Jepang yang disebut dengan *sicho*, dan wakilnya yang membantu pekerjaan sehari-hari diangkat bangsa Indonesia yang biasa dikenal dengan sebutan *fuku sicho*.

11) S. De Graaf dan D.G. Stibbe, *Encyclopedie Van Nederlandsch Indie* (Leiden EJ Brill 1918) jilid IV hal.

Setelah Indonesia Merdeka, Kota Telukbetung dan Kota Tanjungkarang termasuk bagian dari Kabupaten Lampung Selatan, dengan status kota kecil, berpenduduk ± 80.000 jiwa dan luas wilayah 1300 ha, yakni berdasarkan undang-undang No. 22 tahun 1948.

Kira-kira 8 tahun kemudian, berdasarkan pada Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1956 status Kota Tanjungkarang-Telukbetung dinaikkan menjadi *kota besar*, sesuai dengan perkembangannya yang telah mulai meningkat dan menjadi lebih ramai pula di alam kemerdekaan Indonesia, dengan pemerintahan bangsa sendiri.

Dengan perkembangan daerah ini selanjutnya dan atas pertimbangan yang lebih sesuai, maka berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1957 status kota ini berubah menjadi "Kotapraja" Tanjungkarang-Telukbetung, dengan jumlah penduduk ± 130.000 jiwa dan luas total kota 2570 ha, meliputi 2 kecamatan, yakni masing-masing Kecamatan Tanjungkarang dan kecamatan Telukbetung. Sedangkan batas-batas dan luas areal Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung tersebut ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar No. 5 Tahun 1956 Yo undang-undang No. 28 tahun 1959, yang di dalamnya terdapat 4 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Tanjungkarang Barat dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Jalan Bukittinggi-Bambu Kuning, dekat Kaliawi.
2. Kecamatan Tanjungkarang-Timur dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Kampung Sawah Lama (kegiatan kantor camat).
3. Kecamatan Telukbetung Utara dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Sumur Batu.

4. Kecamatan Telukbetung Selatan dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Jalan Mentawai Telukbetung.

Setelah itu berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 1965, status kota ini berubah pula menjadi kotamadya dengan jumlah penduduk semakin meningkat menjadi ± 164.728 jiwa dan luas wilayah 3390 ha.

Kemudian keluar pula Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dengan status *tetap* sebagai Kotamadya dengan luas wilayah yang sama pula (± 3390 ha) namun jumlah penduduk telah jauh bertambah mencapai 205.719 orang. Pada tahun 1977 Kota-madya Tanjungkarang-Telukbetung ini telah berpenduduk ± 221.428 jiwa dengan luasnya tetap 3390 ha.¹²⁾

Semenjak dibukanya pelabuhan Fery Bakauheni 1980 yang lalu yang merupakan pintu gerbang Propinsi Lampung melalui pelayaran laut, dan semakin pesatnya lalu lintas antar Sumatera-Jawa, maka pertumbuhan penduduk Kotamadya Bandar Lampung ini semakin cepat bertambah, sebab kota ini menjadi tempat transit (persinggahan) yang utama dan memegang peranan sangat penting dalam berbagai kegiatan lalu lintas penyeberangan antar pulau yang ramai itu.

Maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tertanggal 30 Januari 1982 tentang

12) Team Penggali Hari Jadi Kota Tanjungkarang-Telukbetung, *Laporan Hasil Penelitian Team Penggali Hari Jadi Kota Tanjungkarang-Telukbetung* (Tanjungkarang: Pemda Tk. II Tanjungkarang-Telukbetung 1982) hal. 1-3 LIHAT PULA:

Bappeda Tk. I Lampung, Pemda Tk. II Tanjungkarang Telukbetung, dan Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah Dep. P.U. *Rencana Induk Tata Kota Tanjungkarang-Telukbetung Analisa dan Rencana* Jilid 2 (Jakarta, Dep. P.U. 1978) hal. 1-21.

Team Research Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Lampung, *Perkampungan di Kota sebagai Wujud Pola Adaptasi* (Tanjungkarang : Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Kanwil Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung, 1982/1983) halaman 19-22.

perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung yang merupakan tambahan perluasan kota ini, yang ditandatangani oleh Presiden Suharto. PP No. 3 Tahun 1982 ini memasukkan 14 desa di Kecamatan Panjang dan 14 Desa pula di Kecamatan Kedaton ke dalam wilayah Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung (yang sebelumnya menjadi wilayah Kabupaten Lampung Selatan). Lalu wilayah kota ini yang sebelumnya hanya 4 kecamatan ditata kembali menjadi 9 wilayah kecamatan, yang masing-masing yaitu:

1. Kecamatan Kedaton, dengan pusat Pemerintahan berkedudukan di *Kedaton*, terdiri atas 8 kelurahan/desa, yaitu:
 - a. Desa Rajabasa
 - b. Desa Gedung Meneng
 - c. Kelurahan Labuhan Ratu
 - d. Kelurahan Kedaton
 - e. Kelurahan Surabaya
 - f. Kelurahan Sidodadi
 - g. Kelurahan Sukamenanti
 - h. Kelurahan Kampung Baru
2. Kecamatan Tanjungkarang Timur, dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di *Kota Baru*, terdiri atas 8 kelurahan/desa yaitu:
 - a. Kelurahan Jagabaya I
 - b. Kelurahan Kedamaian
 - c. Kelurahan Sawan Brebes
 - d. Kelurahan Sawah Lama
 - e. Desa Kota Baru
 - f. Kelurahan Tanjung Agung
 - g. Kelurahan Tanjung Gading
 - h. Kelurahan Rawa Laut

3. Kecamatan Tanjungkarang Barat, dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di *Gedong Air*, terdiri atas 7 kelurahan/desa yaitu:
 - a. Kelurahan Langkapura
 - b. Desa Susunan Baru
 - c. Desa Sukadana Ham
 - d. Kelurahan Segala Mider
 - e. Kelurahan Gedong Air
 - f. Kelurahan Sukajawa
 - g. Kelurahan Sumber Rejo/Kemiling.
4. Kecamatan Tanjungkarang Pusat, dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di *Tanjungkarang*, terdiri atas 10 kelurahan, yakni:
 - a. Kelurahan Tanjungkarang
 - b. Kelurahan Kaliawi
 - c. Kelurahan Kelapa Tiga
 - d. Kelurahan Gunung Sari
 - e. Kelurahan Enggal
 - f. Kelurahan Pelita
 - g. Kelurahan Gotong-royong
 - h. Kelurahan Durian Payung
 - i. Kelurahan Pasir Gintung
 - j. Kelurahan Penengahan
5. Kecamatan Sukarame, dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di *Sukarame I*, terdiri atas 4 kelurahan/desa, yaitu:
 - a. Desa Sukarame I
 - b. Kelurahan Jagabaya II
 - c. Kelurahan Sukabumi
 - d. Desa Tanjungbaru

6. Kecamatan Telukbetung Utara, dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di *Kupang Kota*, terdiri atas 5 kelurahan, sebagai berikut:
 - a. Kelurahan Pengajaran
 - b. Kelurahan Kupang Teba
 - c. Kelurahan Kupang Kota
 - d. Kelurahan Sumur Batu
 - e. Kelurahan Pahoman
7. Kecamatan Telukbetung Selatan, dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di *Telukbetung*, terdiri atas 6 kelurahan, yaitu:
 - a. Kelurahan Telukbetung.
 - b. Kelurahan Pesawahan
 - c. Kelurahan Kangkung
 - d. Kelurahan Gedong Pakuon
 - e. Kelurahan Bumi Waras
 - f. Kelurahan Sukraja
8. Kecamatan Telukbetung Barat, dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di *Negeri Olok Gading*, terdiri atas 6 kelurahan, yaitu:
 - a. Kelurahan Kuripan
 - b. Kelurahan Negeri Olok Gading
 - c. Kelurahan Sukarame
 - d. Kelurahan Kota Karang
 - e. Kelurahan Keteguhan
 - f. Kelurahan Sukamaju
9. Kecamatan Panjang, dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di *Panjang Selatan*, terdiri atas 4 kelurahan/desa, yaitu:
 - a. Kelurahan Wai Lunik
 - b. Kelurahan Panjang Utara

c. Kelurahan Panjang Selatan

d. Desa Srengsem¹³⁾

Setelah perluasan wilayah melalui PP No. 3 tahun 1982 itu maka penduduk Kotamadya Bandar Lampung berjumlah sekitar setengah juta orang atau tepatnya angka yang tercatat adalah ± 472.811 jiwa, 7640 orang di antaranya adalah warga negara asing dan selebihnya adalah bangsa Indonesia/WNI asli terdiri atas berbagai suku yang sangat majemuk serta beragam pula bahasa dan dialeknya masing-masing di samping memang berbeda pula adat istiadatnya.

Dengan demikian dapat dianalisa betapa kota ini berkembang pesat sekali, yakni dalam masa kira-kira 30 tahun sejak Indonesia merdeka jumlah penduduknya naik sekitar 6 kali lipat, yakni dari ± 80.300 jiwa di awal kemerdekaan menjadi hampir setengah juta sekarang. Dan dalam masa 5 tahun terakhir saja sejak tahun 1977 yang lalu telah bertambah lebih dari 2 kali lipat, yakni dari jumlah kurang dari seperempat juta pada tahun 1977 itu. Sedangkan luasnya sekarang ini telah bertambah lebih dari 13 x dari masa awal kemerdekaan, dan lebih dari 5 x dari luas tahun 1977 (selama 5 tahun terakhir).

Akhirnya tentu ada baiknya pula dicantumkan di sini nama-nama pimpinan utama (*top leader*) yang pernah menduduki jabatan wali kota/kepala daerah kotamadya ini sejak statusnya ditingkatkan dari kota kecil pada tahun 1956 disertai pula dengan lama masa jabatannya masing-masing, yaitu:

1. Soemarsono (1956 – 1957)
2. H. Zainal Abidin Pagar Alam (1957 – 1963)

13). PP. No. 3 tahun 1982/Lembaran Negara RI No. 6 tahun 1982 Zulkarnain Subing. *Riwayat singkat Hari Jadi Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Teluk-betung/Bandar Lampung* (Bandar Lampung: Pemda Kodya Bandar Lampung, 1982) halaman 2-3.

3. Alimuddin Umar SH (1963 – 1969)
4. Drs. H.M. Tabrani Daud (1969 – 1976)
5. Drs. H. Fauzi Saleh (1976 – 1981)
6. Drs. H. Zulkarnain Subing (1981 – Sekarang)¹⁴⁾

Jika para pengunjung baru datang di kota ini, maka ciri khususnya yang segera nampak berdiri megah di depan kota adalah "tugu kemerdekaan" yang baru saja diresmikan tanggal 10 Nopember 1983 yang lalu dan merupakan "monas"-nya Kotamadya Bandar Lampung.

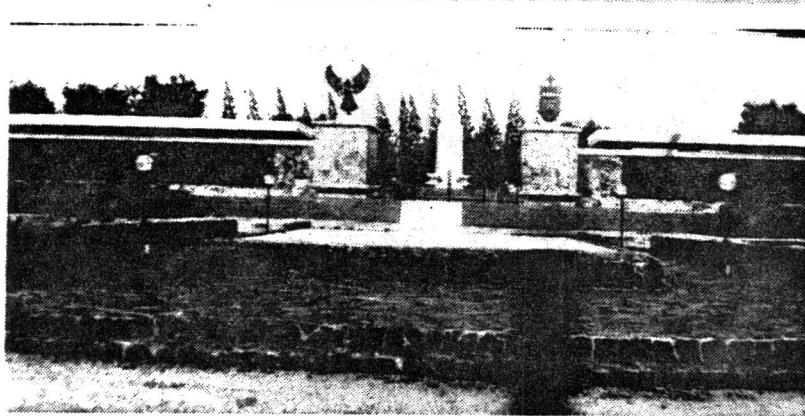
3.5 Urbanisasi dan Teori Model Ekologi Sosial

Dari begitu pesatnya laju perkembangan penduduk dan perluasan Kota Bandar Lampung, sudah jelas dan terbukti bahwa urbanisasi merupakan faktor penyebab yang utama, di samping itu perpindahan penduduk dari daerah-daerah/kota-kota lain dan kenaikan karena kelahiran (kenaikan alami) hanya merupakan angka yang relatif kecil dibanding urbanisasi tersebut. Arus perpindahan penduduk dari daerah-daerah pedesaan menuju kota ini nyata semakin cepat sejak kira-kira 10 tahun terakhir ini.

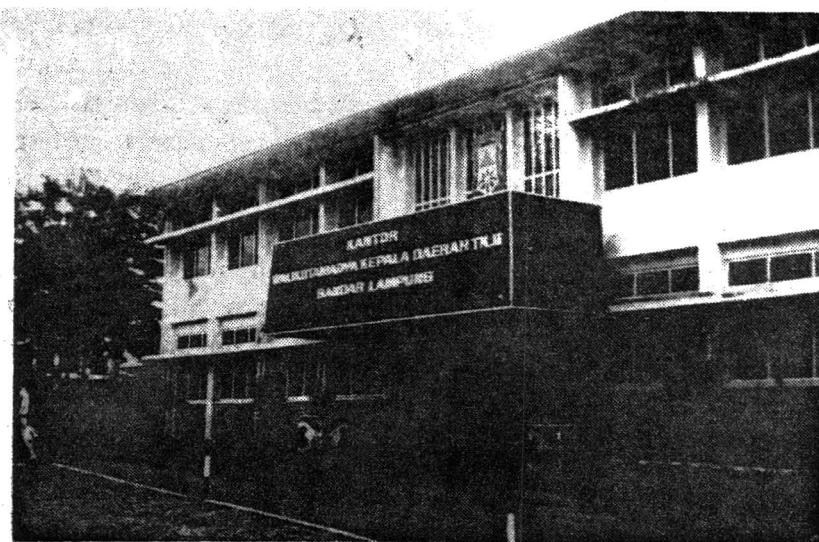
Dari beberapa data dan analisa tentang penyebab mengalirnya laju urbanisasi itu (yang merupakan push and pull factor) yakni faktor pendorong dan penarik untuk berhijrah ke kota dapat diketahui sebagai berikut:

- 1) *Sulitnya kehidupan di desa*, rendahnya harga hasil-hasil pertanian/sayur-sayuran dan sebagainya di daerah pedesa-

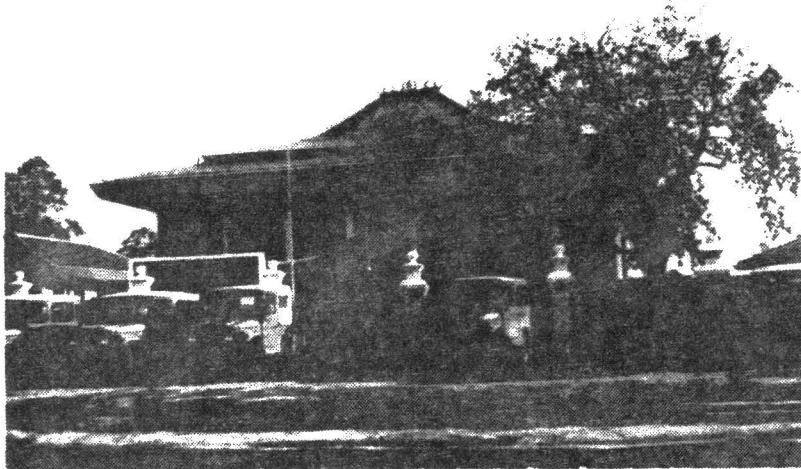
- 14). Foto-foto yang cukup besar serta masa jabatan dari para ex Wali Kota ini pada dewasa ini dipajang dengan baik pada dinding ruangan Balai Kota Bandar Lampung yang disusun beraturan. Penelitian/Research ini berlangsung sampai tahun 1984.



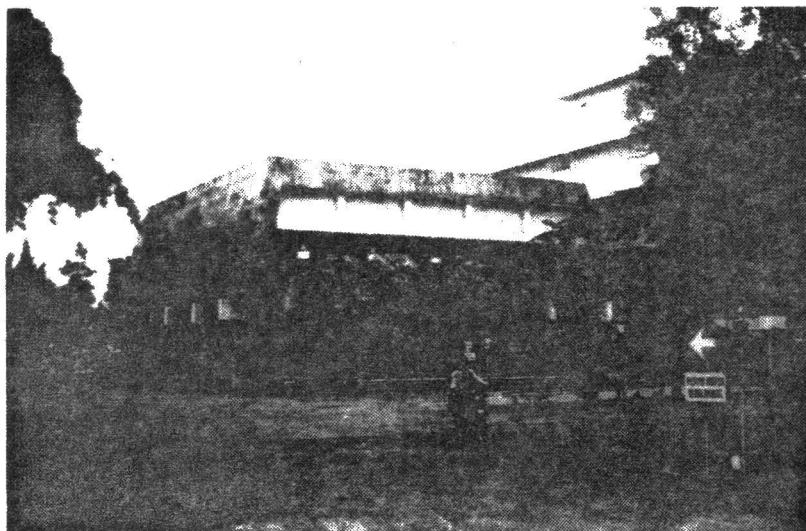
***MAKAM PAHLAWAN di Kedaton
Kotamadya – BANDAR LAMPUNG***



***Kantor Wali Kotamadya/Kepala Daerah Tk. II
BANDAR LAMPUNG***



*GUBERNURAN Propinsi Lampung
BANDAR LAMPUNG*



*Kantor Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Lampung di Teluk Betung
BANDAR LAMPUNG*

an itu, sehingga nilai uang Rp. 1.000,- begitu tingginya di desa, sedangkan di kota hampir-hampir tak ada nilainya. Teramat sulit mencari uang Rp. 1.000,- bagi rakyat desa/petani desa, terutama pada musim-musim pecelik, meskipun mereka sudah bekerja berat setiap hari. Bahkan pada sesuatu desa dan pada waktu-waktu tertentu banyak rakyat yang tak mampu membeli beras, lalu hanya memakan ubi-ubian apa yang ada dan yang mungkin dapat dimakan.

- 2) *Banyaknya gangguan keamanan* di desa-desa daerah Lampung berupa pencurian, perampukan dan bahkan pembunuhan, terutama sebelum munculnya penembak-penembak misterius tahun 1982 – 1983 yang lalu. Rakyat dili-puti oleh rasa takut-takut, karena hasil perkebunan/tanam-tanaman dicuri orang, diambil terang-terangan dan dirampas, binatang ternak banyak yang hilang atau diambil secara kekerasan, dan jika tidak mau menyerahkannya akan menerima resiko yang berbahaya. Membawa sekarung cengkih saja untuk dijual ke Kota Bandar Lampung, namun pada waktu pulang uangnya sudah dirampas orang lain.

Jadi rasa aman bagi rakyat desa terutama yang agak mampu tidak terjamin. Sering ada gangguan keamanan atau memang ada pribadi-pribadi penjahat yang menakut-nakuti rakyat desa, yang menyebabkan banyak rakyat yang lari ke kota yang relatif lebih aman karena orang lebih ramai. Di desa karena penduduknya sepi lagi pula kelihatan kurang kompak, sehingga sering muncul orang-orang jagoan yang merajalela di desa, yang untuk melaporkan kepada alat-alat negara pun rakyat tidak berani, sebab mereka akan mendapat balas dendam dari penjahat.

3. *Alat-alat pertanian dan cara-cara bekerja yang masih tradisional*, yang tidak menarik minat bagi generasi muda terutama yang agak terpelajar untuk terjun ke lapangan pertanian itu. Generasi muda yang pernah tinggal atau bersekolah di kota tidak berminat untuk kembali ke desa, apalagi akan kembali bertani dengan cara-cara dan alat-alat yang tradisional itu, meskipun sebenarnya dia sendiri sebelum ke kota adalah bekerja sebagai petani dan orang tuanya sendiri masih tetap bekerja sebagai petani seperti dulu.

Generasi muda desa banyak terpengaruh oleh berita-berita dan percakapan dengan teman-temannya yang datang dari kota, tentang pekerjaan di kota tidak seberat pekerjaan di desa, dan hasilnya lebih besar, serta dalam waktu yang cepat dapat memperoleh uang. Sedangkan di desa harus menunggu lama dari musim ke musim dengan perolehan uang yang sedikit pula dan tidak bisa membeli motor apalagi membeli mobil seperti orang-orang di kota.

4. *Terlalu kontrasnya gaya hidup di kota dan di desa*. Di kota orang serba bersih, serba bagus, dan gengsi, sedangkan di desa serba sederhana apa adanya, serba ketinggalan model dan tidak bergaya, malah selalu saja berpakaian serba kotor sebagai petani tiap hari dari pagi sampai petang. Faktor ini yang membawakan pengaruh besar pada jiwa generasi muda, di mana mereka saling mempengaruhi untuk pindah mengadu nasib di kota tanpa modal materiil maupun ilmu yang cukup untuk berada pada tingkat lapis kehidupan masyarakat yang memungkinkan untuk berkembang.

Keempat faktor tersebut di atas memperlihatkan tendensi yang memang menjurus pada apa yang menjadi semboyan Wirth dengan esainya yang populer "*Urbanism as a way of life*"¹⁵) (Urbanisme sebagai suatu cara hidup) yang mau tak mau mesti mereka tempuh demi memandang masa depan dengan penuh harapan, sedangkan hidup di desa sudah hampir pasti bahwa kehidupan mereka akan tetap suram.

Demikian mereka di kota hidup dan berjuang (*struggle for life*) dengan segenap kemampuannya bekerja di dalam bidang apa saja yang mungkin untuk kehidupan terutama kebutuhan makan harian lebih dulu, serta mencampuri arena macam-macam kegiatan masyarakat kota diantara berbagai suku bangsa serta berbagai corak usaha.

Namun betapapun juga hebatnya urbanisasi di Kota Bandar Lampung serta semakin menyempitnya tempat tinggal, sehingga terdapat kampung-kampung yang tempat tinggal masyarakatnya berdempetan, tetapi nampaknya teori model Ekologi Sosial yang dikembangkan oleh Van Syoberg tentang kota di masa pra-industri, yang merupakan penyempurnaan dari teori mazhab Chicago tahun 1920-an dan menggunakan kota-kota di India sebagai model,¹⁶) ternyata di Bandar Lampung tidak berlaku. Di sini golongan masyarakat kasta tinggi (pemimpin/pemuka-pemuka masyarakat) bukan saja tidak menguasai pusat-pusat kota, tetapi memang tidak mau dan tidak merasa perlu tinggal di pusat-pusat kota itu.

15). Hans-Dieter Evers, *Sosiologi Perkotaan* (Jakarta, LP3ES, 1982) halaman 4. Louis Wirth, *Urbanism as a way of life* 44, 1938.

16) Hans Dieter Evers, *ibid* hal, 6 Brian JL. Berry dan dan Howard, Spodek, *Comparative Ecology of Large Indian Cities*, *Economic Geography* 47,2 (Supplement), halaman 266 – 285.

Mereka itu dan termasuk intelektual dan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan (*high class*) sengaja mencari daerah-daerah yang agak jauh dari pusat kota dan yang bersuasana tenang lagi berudara nyaman untuk kehidupan, lagi pula memungkinkan dengan luas halaman/pekarangan yang memadai dan malah memuaskan.

Daerah-daerah yang terdekat dengan pusat kota hampir sepenuhnya ditempati oleh masyarakat kelas rendah, pedagang kecil, buruh kasar atau orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan-pekerjaan tetap, sehingga susunan bangunan dan gang-gang menjadi sukar diatur, malah menjadi daerah-daerah becek dan kotor yang merupakan daerah-daerah *slums* (pencomberan) seperti yang banyak terdapat di kota-kota besar di India atau Afrika.

Memang anggota-anggota masyarakat yang setaraf itu yang kuat keinginannya tinggal di daerah-daerah yang pengab dan sempit itu, dengan pertimbangan mereka yang praktis pula, yakni dekat dengan pusat pasar dan keramai-an yang ada tempat hidupnya usaha-usaha yang bermacam-macam (dagang, memburuh, peragenan/komisi-komisi jasa jual-beli, dan sebagainya dan tidak memerlukan biaya transportasi pulang pergi ke tempat usaha dagang, serta cepat pula sampai di tempat tujuan maupun pulangnya, dan kehidupan mereka memang suka dan terbiasa di tempat yang ramai dan bising itu.

Namun "Teori Lingkaran Konsentraris" yang disusun oleh Ernest W. Burgess yang merupakan pengembangan pula dari mazhab Chicago, memang relevan dan berlaku di kota ini, khususnya yang menyatakan bahwa "Semakin dekat letak tanah itu dari pusat kota semakin mahal harganya. Semakin jauh dari pusat kota, harga tanah semakin murah"

Tentunya tanah-tanah memang menjadi banyak permintaan dari para pengusaha pula dan untuk tempat usaha-usaha dagang, meskipun arealnya hanya kecil dan sempit. Dan khususnya lagi tanah-tanah yang menjadi mahal itu adalah yang terdekat/menghadap pinggir-pinggir jalan besar, sedangkan tanah perumahan yang terletak di balik/di belakang pertokoan hanya dengan harga biasa saja malah relatif lebih murah dan tidak banyak permintaan.

Juga hasil studi perbandingan di kota-kota India yang ditulis Berry dan Spodek tidak berlaku di kota ini. Berry dan Spodek menyimpulkan bahwa "Golongan yang berstatus tinggi tinggal di pusat perkotaan, sementara golongan yang berstatus rendah tinggal di daerah pinggiran".¹⁷⁾

Di Kota Bandar Lampung ternyata golongan yang berstatus tinggi sengaja mencari tempat tinggal pada lokasi-lokasi yang jauh dari pusat kota dengan maksud untuk mendapatkan ketenangan dan terhindar dari kebisingan, di samping itu mereka lebih bebas mendapatkan tanah yang cukup luas untuk lokasi perumahan serta hawa yang segar.

Status tinggi di sini dapat diukur dari segi kedudukannya dalam ranking struktur sosial kemasyarakatan umum dan di dalam suku (*clan*) atau "buai" masing-masing, atau dilihat dari jabatannya pada pemerintahan serta tingkat pendidikan intelektualisasi, dan dilihat pula dari segi jumlah kekayaan/materi serta standard kehidupan pada umumnya.

17). Brian JL. Berry dan Howard Spodek, *Comparative Ecology of Large Indian Cities*, Economic Geograpppy 47, 2 (Supplement 19710, pp. 266 – 285.
– Hans-Dieter Evers, *Op. cit.* hal. 7.

Hanya Cina yang berstatus ekonomi tinggi yang tinggal di pusat Kota Bandar Lampung, yang tempat tinggal mereka itu berfungsi serba guna, yakni berupa toko-toko bertingkat untuk berdagang dan gudang, serta sekaligus juga buat tempat tinggal bersama keluarga. Namun setelah diteliti secara mendalam lagi, ternyata pula hanya Cina-cina pedagang tingkat menengah yang berdomisili di pusat-pusat kota ini, sedangkan pedagang besarnya bertempat tinggal di Jakarta, yang apabila sewaktu-waktu datang ke daerah ini untuk mengontrol usaha mereka, lalu menginap di hotel kelas wahid (misalnya Marcopolo Hotel dan lain-lainnya) yang juta terletak jauh dari pusat kota.

Jadi dapat diambil suatu kesimpulan untuk kota ini bahwa semakin tinggi status anggota masyarakat itu baik ditinjau dari ranking di dalam suku, status pangkat/jabatan, maupun standar kekayaan, semakin tidak suka tinggal di pusat-pusat kota, yang merupakan kebalikan dari apa yang berlaku pada kota-kota besar di India itu, demikian juga dengan status tingkat pendidikan dan intelektualitas seseorang itu.

3.6 Spekulasi dan Pemilik Tanah Absentee

Sehubungan dengan perluasan kota ini ditahun 1982 yang mencapai sekitar 6x dari areal sebelumnya, melihat pula pesatnya perkembangan/pertambahan penduduknya relevanced dengan perkembangan penduduk Propinsi Lampung sendiri yang memang pesat disertai dengan prospek kemajuan daerah ini yang cerah bagi penanaman modal di bidang tanah, maka sejak kira-kira 15 tahun terakhir ini timbul bermacam-macam usaha transaksi dan spekulasi tanah di daerah ini yang cukup ramai pula.

Transaksi/jual beli tanah merupakan suatu usaha sekunder yang rutin pula bagi banyak pihak, termasuk oleh kalangan pegawai negeri dan anggota ABRI (sebagai usaha sambilan mendapatkan penghasilan tambahan dari gaji yang dirasakan tidak mencukupi, yang populer dengan istilah "ngobyek"), yang sekaligus juga melakukan spekulasi tentang harga tanah, terutama juga peningkatan-peningkatan harga pada setiap tahun dan setiap perkembangan situasi moneter ataupun kenaikan bahanbakar minyak.

Harga-harga tanah melambung mencapai 10 s.d. 20 kali dari harga 15 tahun yang lalu, dan bergantung pula dari jarak-jauh atau dekatnya dengan pusat kota, atau letak strategis yang semula berada di pinggir dan di luar kota ini telah berada di dalam kota serta berada pula di pinggir jalan raya yang ramai, menyebabkan harganya menjadi amat beragam dan tidak stabil, karena calo juga berperanan besar.

Pada sekitar satu dekade masa yang lalu, kaum modal sederhana seperti di antara pegawai negeri/di antara anggota ABRI tingkat menengah atau ranking bawah dengan modal satu sampai dengan lima juta rupiah telah dapat membeli satu s.d. lima hektar tanah di bagian pinggir kota ini yang kemudian dikaplingkan dan dijual secara kredit bulanan kepada para pegawai negeri/anggota ABRI lain yang memerlukannya dengan keuntungan 5 s.d. 10 kali lipat (500 – 1000%). Lama masa angsuran biasanya antara 10 bulan s.d. 3 tahun lunas.

Aktivitas dalam usaha perkaplingan tanah ini nampak berkembang menjadi ramai. Efek positifnya ialah para pegawai menengah/rendah pun dapat dan mampu membeli tanah secara angsuran dan membuat rumah secara angsuran, dengan berhemat bisa membuat rumah sendiri.

Banyak orang dari etnik asal Banten yang telah tinggal lama di daerah ini sejak dari nenek moyang mereka, dan semula mempunyai areal tanah yang luas tetapi dengan mata pencaharian atau kegiatan ekonomi yang tidak hidup/tidak stabil atau tidak berpenghasilan tetap, lalu semakin lama semakin terdesak. Tanah dijual satu kaplingan demi satu kaplingan, bahkan rumah pun juga untuk keperluan biaya hidup sehari-hari, untuk biaya perkawinan anak, atau berbagai upacara-upacara lain. Akhirnya mereka semakin terdesak kepinggir kota, rumah yang berada di dalam kota dijual dengan harga cukup mahal dan sebagian uangnya dibelikan tanah dan membuat rumah lain di pinggir kota dengan biaya yang lebih murah, dan sebagian uang hasil penjualan rumah tadi dikonsumsi untuk biaya rumah tangga dan keperluan lainnya.

Di lain pihak para spekulan membuat tarif harga tanah begitu tinggi (yang merupakan harga semu), secara tak resmi tetapi populer secara bersambung dari mulut ke mulut mereka membuat tarif harga tanah pada sesuatu daerah lokasi dengan cukup tinggi, tetapi sebenarnya transaksi tidak terjadi, sebab pembelinya juga sulit diperoleh. Meskipun satu dua terjadi juga jual beli itu tetapi jauh di bawah harga patokan semu tersebut. Namun mereka pun memang tidak merasa perlu untuk cepat-cepat/terburu menjual tanah dengan harga murah, kecuali jika sedang terdesak memerlukan uang, yang umumnya untuk berbagai upacara atau memasukkan anak pada suatu perguruan tinggi di Pulau Jawa.

Mereka dengan yakin beranggapan bahwa investasi uang pada tanah adalah paling aman, tidak ada resiko rugi, dan harganya selalu semakin tinggi. Jadi mereka senang menahan harga yang tinggi.

Karena adanya kebijaksanaan pemerintah membangun rumah-rumah murah/Perumnas akhir-akhir ini dan dari usaha-

wan-usahawan *real estate* dan sebagainya yang memerlukan harga tanah yang semurah mungkin, maka mereka hanya mendapatkan tanah pada lokasi-lokasi yang lebih jauh di pinggir kota, lalu terjadilah "*Pembangunan Lompat Katak*" di dalam kota ini menuruti pola perkembangan "*Lompat Katak*", seperti yang ditemui dan ditulis oleh Hans Dieter Evers mengenai Singapura dan di sebuah kota kecil di pantai timur Malaysia Barat beberapa tahun yang lalu.¹⁸⁾

Hal ini adalah sebagai akibat terjadinya benturan kepentingan 2 pihak yang tidak dapat dikompromikan, yakni pemerintah dan pengusaha *real estate* yang memerlukan tanah dengan harga murah di satu pihak, sedangkan pemilik tanah terutama spekulan tetap menahan harga dan tidak merasa perlu untuk segera melepas tanahnya apalagi tanah adalah termasuk tempat pemupukan harta, serta sebagai *lambang status* pula yang turut mengangkat derajat di mata orang banyak.¹⁹⁾

Meskipun tidak dalam ukuran yang terlalu luas, tetapi di dalam Kota Bandar Lampung ini juga banyak terjadi pemilikan tanah *absentee*, di mana beberapa ha tanah kosong atau beberapa kaplingan tanah perumahan berada di dalam kota ini, sedangkan si pemilik berdomisili jauh tinggal di Jakarta atau kota-kota lain di Indonesia, seperti yang banyak dilakukan oleh bekas-bekas pejabat daerah yang pindah ke kota-kota lain.

Pemilikan tanah *absentee*²⁰⁾ memang amat banyak terdapat di dalam daerah Propinsi Lampung serta di dalam ukuran yang sangat luas pula, baik di dalam daerah Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Lampung Selatan dan ter-

18) Hans Dieter Evers, *Sosiologi Perkotaan* (Jakarta : LP3ES, 1982) halaman 24 – 26.

19) Hans Dieter Evers, *Loc. cit.*

20) *Ibid* halaman 27 – 32.

utama sekali di sekitar jalan lintas antara Kotamadya Bandar Lampung menuju Pelabuhan Ferry Bakauheni, yang berada di tangan pengusaha-pengusaha besar atau dengan istilah rakyat di daerah ini yaitu *milik orang-orang berduit* tingkat tinggi di ibukota Jakarta.

Jadi meskipun kelihatan tanah-tanah memang luas di daerah Lampung tetapi bagi orang di Lampung sendiri akhir-akhir ini sudah mengalami kesulitan mendapatkan tanah, kecuali dengan harga tinggi. Tanah memang tetap berada di Lampung, tetapi orang yang punya tanah adalah berdomisili di Jakarta atau tempat-tempat lain.

BAB IV SEJARAH SOSIAL BUDAYA

Kotamadya Bandar Lampung sebagai ibukota Propinsi daerah tingkat I Lampung, mencerminkan kemajemukan masyarakat propinsi ini secara rial. Lambang propinsi dengan motto "Sang Bumi Ruwa Jurai"¹⁾ yang berarti bahwa di dalam wilayah propinsi ini berdiam 2 unsur golongan masyarakat yakni: (a) Suku asal Lampung; dan (b) Pendatang yang beragam.

Suku asal Lampung sendiri terdiri pula atas 2 sistem kesatuan adat yakni:

1. Sistem Adat Pepadun (Yang punya sistem kursi keratuan/kursi kerajaan) yakni terdiri atas masyarakat Abung, Tulangbawang, Wai Kanan, Sungkai, dan Pubian.
2. Tidak dengan sistem Adat Pepadun (tidak dengan bentuk kursi keratuan/kerajaan), yakni yang meliputi masyarakat: Pesisir Krui, Pesisir Belalau/Ranau, Pesisir Semangka, Pesisir Teluk, Pesisir Rajabasa, Pesisir Melinting Meringgai,

dan masyarakat Komering, Kayu Agung, serta masyarakat daerah enclave Semendo.¹⁾

Mengenai yang beradat non-Pepadun ini terdapat pula perbedaan-perbedaan sebutan dan pendapat, yakni yang menyebutnya dengan istilah "Peminggir" untuk kesatuan adat masyarakat : Krui, Belalau Ranau, Komering, dan Kayu Agung, yang menurut asal-usul sejarahnya berasal dari Skala Brak menyebar tempat tinggal mereka ke daerah-daerah di mana mereka bertempat tinggal sekarang, yang memang terletak di bagian sebelah pinggir dari daerah yang didiami oleh masyarakat Abung/masyarakat Pepadun.

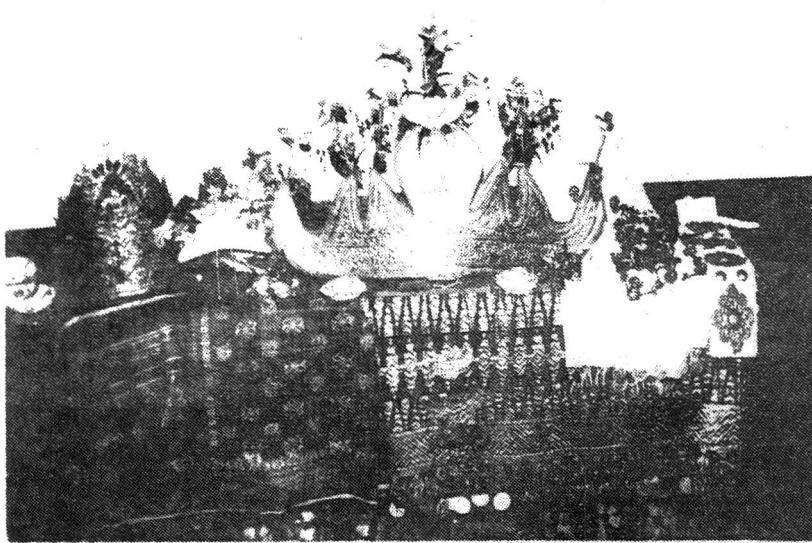
Sedangkan untuk masyarakat Semangka, Teluk, Rajabasa, Melinting Meringgai, disebut dengan istilah "Pesisir", sebab mereka memang tinggal berdiam di dareah pesisir pantai Sumatera bagian paling selatan, dan mereka ini berasal-usul dari Banten/keturunan Banten, di mana percampuran suku Banten di daerah ini memang telah ratusan tahun.

4.1 Bandar Lampung: Kota Nasional Ke-2

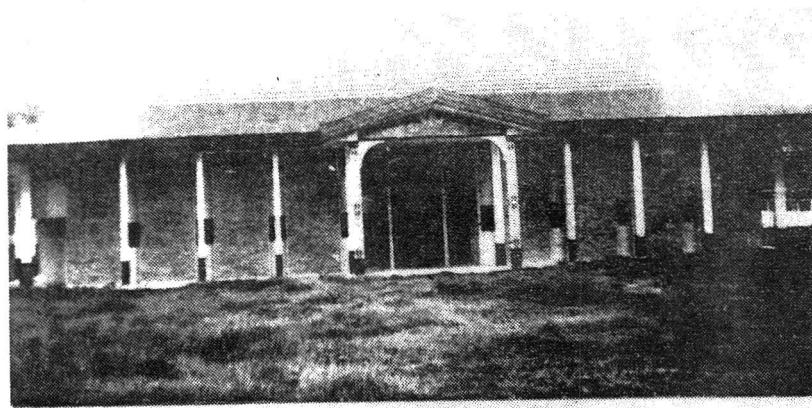
Jadi Lampung Pesisir ini, selain mereka yang memang berasal-usul dari Banten, juga percampuran antara turunan dari Skala Brak dengan asal-usul Banten, yang dengan perkembangan zaman selama ratusan tahun terjadi akultifikasi kembangan zaman selama ratusan tahun terjadi akultifikasi

1) DPRD dan Pemda Propinsi Lampung, *Penjelasan tentang Isi dan Arti Lampung Daerah Propinsi Lampung – Sang Bumi Ruwa Jurai* (Teluk Betung : Pemda Propinsi Lampung, 1971) LIHAT PULA :

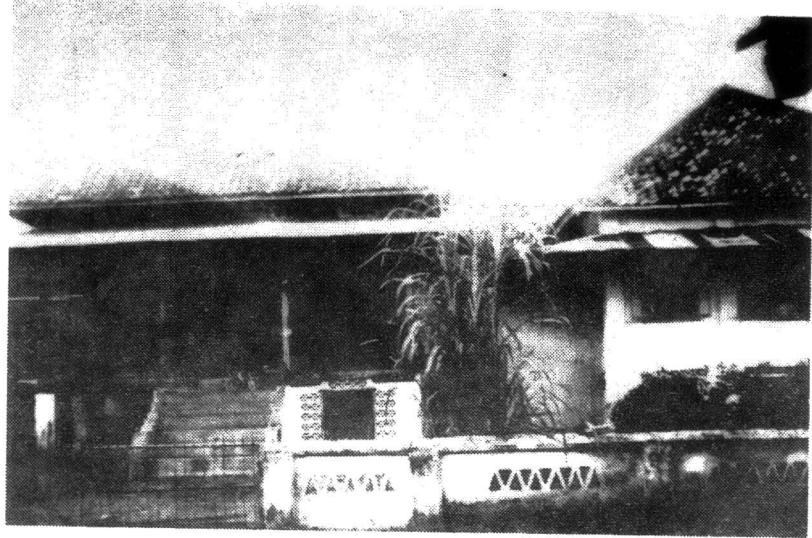
– Hilman Hadikusuma, *Sejarah dan Adat Istiadat Lampung* (Tanjungkarang : Fakultas Hukum Universitas Lampung/Unila, 1978) halaman 73 – 76.
– -----, *Persekutuan Hukum Adat Abung-Dalam Perkembangannya dari masa ke masa*, didalam Risalah Ilmu Pengetahuan BUNGA RAMPALI ADAT BUDAYA, No. : 2 Tahun II (Telukbetung : F.H. Unila, 1974) halaman 25 – 27.



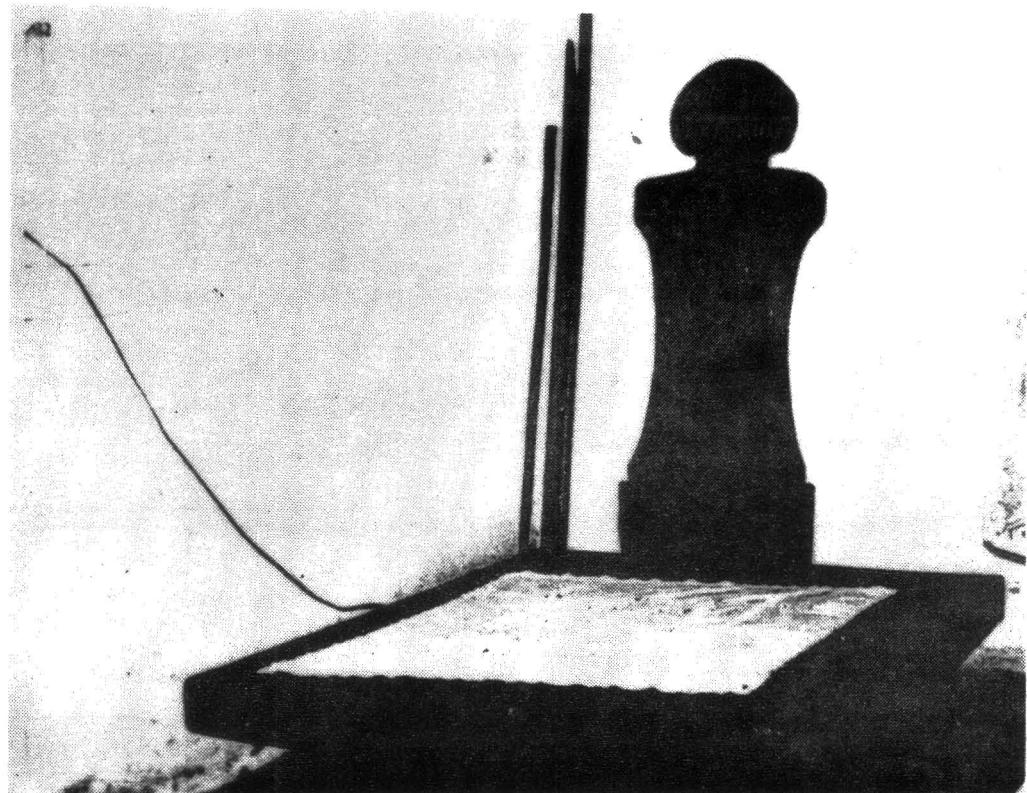
*Pakaian Adat Lampung Pubian
di Labuhan Ratu – BANDAR LAMPUNG*



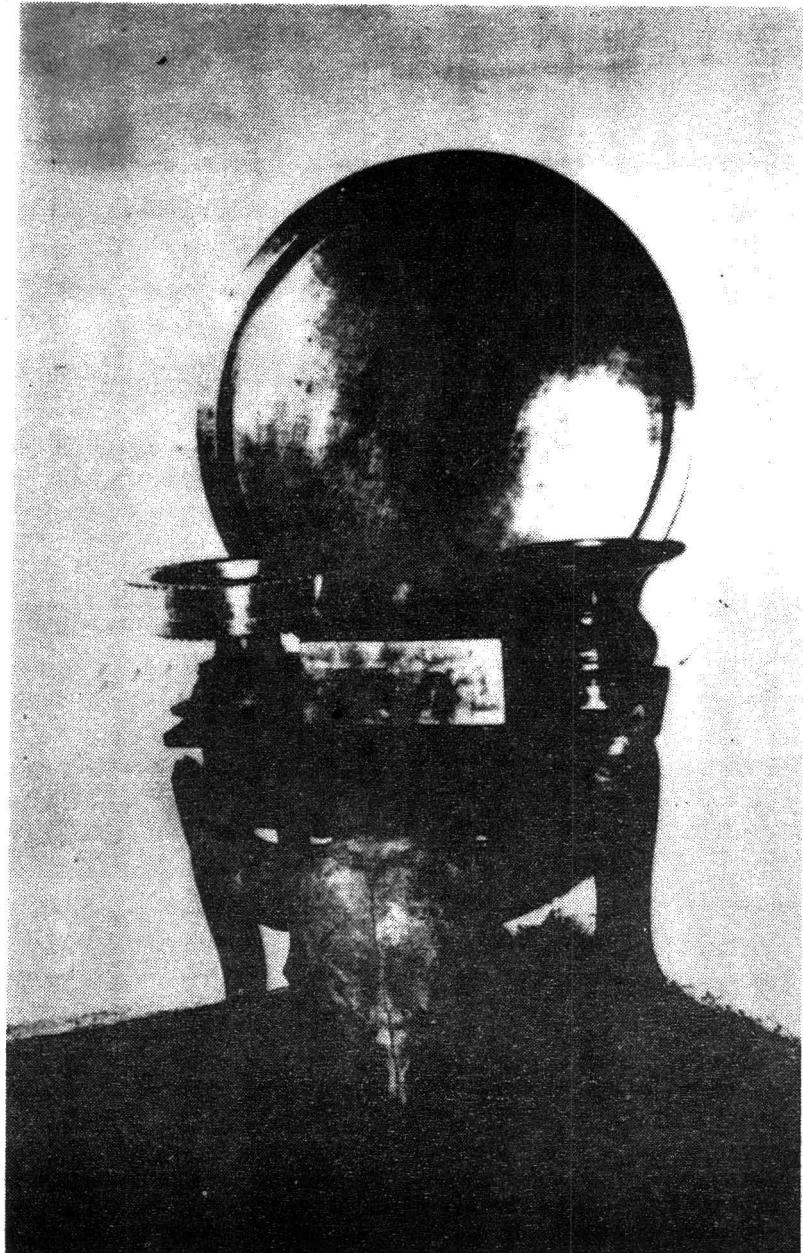
*"MUSIUM" Daerah Lampung
di Gedung Meneng – BANDAR LAMPUNG*



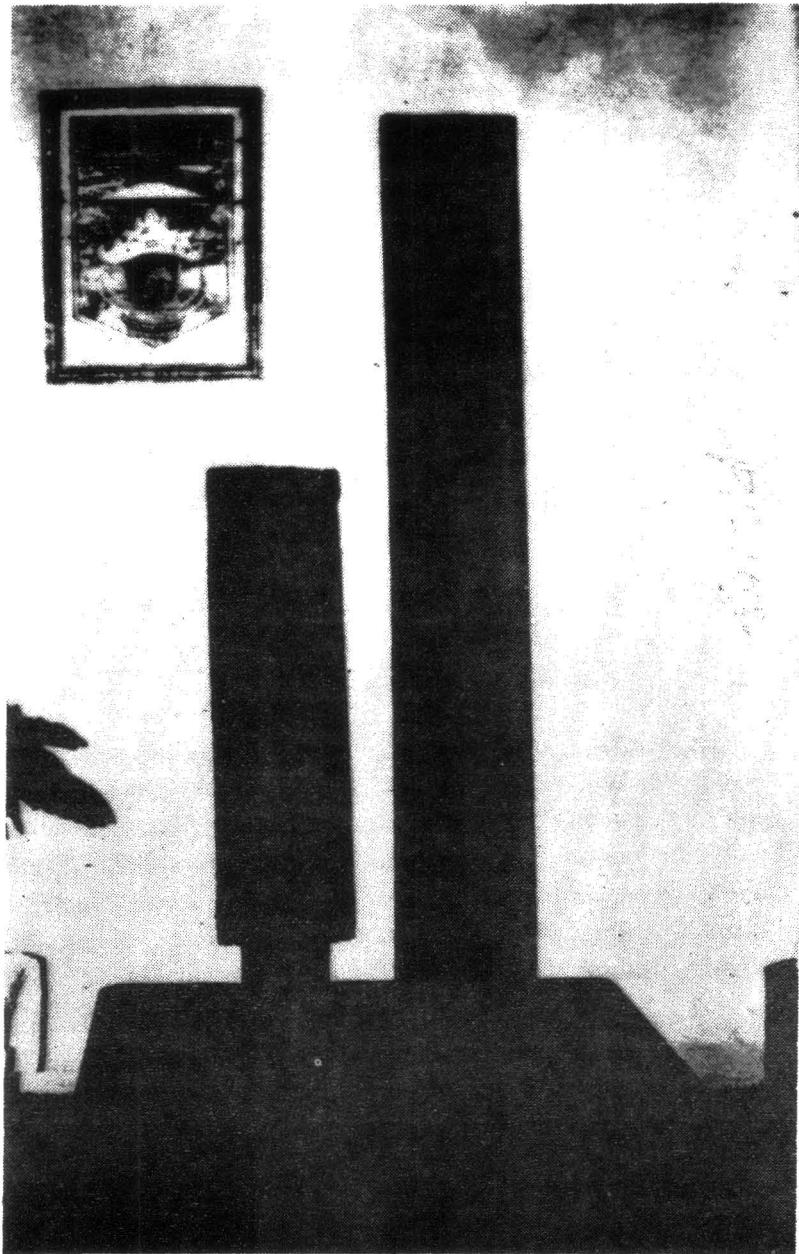
*Bentuk Rumah Asli Adat Lampung Pubian
di Labuhan Ratu – BANDAR LAMPUNG*



*"PEPADUN" (Kursi Kebesaran Adat)
Lampung Pubian di Labuhan Ratu
BANDAR LAMPUNG*



*TEMPAT SIRIH dan Tempat Ludah Air Sirih
Penganten Adat Lampung Pubian
di Labuhan Ratu – BANDAR LAMPUNG*



*Bentuk lain dari "PEPADUN"
(Kursi Kebesaran Adat)
Lampung Pubian – BANDAR LAMPUNG*

dan assimilasi hingga telah benar-benar menyatu; namun beberapa ciri-ciri khas masih bisa terlihat dan mengesan.

Di samping itu baik *peminggir* maupun *pesisir* ada pula yang menyatakan bahwa mereka semua lebih suka disebut dengan istilah *pesisir* (selain yang beradat Pepadun). Pernyataan tersebut sebenarnya tentu kurang beralasan yang kuat bila ditinjau secara asal-usul maupun dilihat dari geografi daerah yang mereka diami, khususnya Belalau Ranau, Komering dan Kayu Agung, sebab daerah perkampungan mereka memang tidak di *pesisir* pantai, tetapi di daratan Sumatera utara Propinsi Lampung dan termasuk wilayah Propinsi Sumatera Selatan, dan menurut sejarahnya mereka memang berasal dari turunan Skala Brak yang memencar menuju utara. Sedangkan Abung dan yang beradat Pepadun lainnya akhirnya mendiami lokasi bagian tengah Propinsi Lampung sekarang, di samping terjadi pula percampuran-percampuran.

Pada masa-masa selanjutnya berkembang pula di sini suku-suku pendatang yang bervariasi banyak sekali asal daerahnya, yang masing-masing sekarang dengan jumlah persentasi cukup besar dan hampir berimbang, yang terdiri atas: Suku Banten-Sunda, Jawa, Sumatera Selatan (Komering, Ogan, Semendo, Pasemah), Minangkabau, Bengkulu, Cina, Batak, Bugis, Bali, Menado, Ambon, Aceh, Jambi, Riau dan lain-lain.

Kemajemukan suku yang beraneka warna dengan beragam bahasa dan dialek ini pula sangat kentara terwujud dan berkomunikasi di dalam Kota Bandar Lampung setiap hari dan pada setiap aktivitas manusia.

Meskipun tiap-tiap suku yang banyak itu memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, namun sebagai bahasa perhubungan resmi di dalam berbagai kegiatannya selalu dipakai bahasa Indonesia. Pembicaraan dan pemakaian bahasa Indonesia sebagai

bahasa sehari-hari oleh rakyat dari semua tingkat, golongan dan suku, terealisasi dengan nyata dan terus-menerus. Di sini tidak ada satu bahasa daerah yang mendominasi bahasa-bahasa daerah ini, atau yang menjadi bahasa dominan di kalangan rakyat setiap hari.

Di pasar dan di jalan-jalan terdengar rakyat berkomunikasi di dalam bahasa Indonesia, di kantor-kantor pemakaian bahasa Indonesia lisan sangat merata, di sekolah-sekolah rendah, menengah, perguruan tinggi, anak-anak, siswa-siswi dan para mahasiswa berbicara di dalam bahasa Indonesia, di stasiun, di pelabuhan, di bioskop dan tempat-tempat umum lainnya, bahkan juga dikebun/lahan-lahan pertanian pun telah membudaya percakapan dengan bahasa Indonesia. Nyata sekali bedanya dengan daerah-daerah lain (propinsi/kota-kota lain di Indonesia) di mana bahasa daerah setempat sangat terasa dominan. Misalnya di Palembang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Selatan dan tetangga yang terdekat bagi Lampung, dominasi bahasa dan dialek setempat sangat kentara. Di Padang (Sumatera Barat) dominasi pemakaian bahasa daerah Minangkabau amat nyata. Di Medan (Sumatera Utara) pemakaian bahasa Melayu dan Batak di dalam percakapan sehari-hari amat menonjol; demikian pula di Aceh, dan lain-lainnya lagi.

Di Bandung (Jawa Barat) umumnya orang berbicara dengan bahasa Sunda. Di Yogyakarta (Jawa Tengah) dan Jawa Timur (termasuk ibukota propinsinya Surabaya) rakyat umumnya berkomunikasi lisan dengan menggunakan bahasa Jawa. Demikian pula di Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur, pemakaian bahasa daerah masih menjadi tradisi masyarakat daerah setempat.

Tetapi di Lampung (khususnya lagi Kotamadya Bandar Lampung) pemakaian bahasa Indonesia memang sudah mema-

syarakat benar-benar, membudaya dan rutin di kota sampai ke desa-desa.

Jadi memang beralasan untuk dikatakan bahwa *daerah Lampung adalah Indonesia mini, dan Kotamadya Bandar Lampung adalah kota nasional kedua setelah Jakarta*, terutama dilihat dari keberagaman penduduk serta kelaziman bahasa yang dipakai sehari-hari, yakni pemakaian bahasa nasional yang merata di kalangan rakyat.

Meskipun amat banyak terdapat bahasa dan dialek daerah yang bermacam-macam, namun pemakaian bahasa nasional/bahasa Indonesia dapat mendominasi secara lebih merata dari pada bahasa daerah mana pun.

Kotamadya Bandar Lampung sebagai kota terbesar di propinsi ini, selain pusat pemerintahan, juga pusat perdagangan bagi aktivitas niaga rakyat daerah ini, serta merupakan kota transit bagi arus mobilitas penduduk antara Sumatera dan Jawa.

Tiga pintu keluar masuk yang semakin memperlancar arus lalu lintas manusia daerah ini terpegang kendalinya di Kotamadya Bandar Lampung. Setasiun kereta api lintas Palembang-Jakarta melalui Tanjungkarang, Lapangan Udara Branti, dan Pelabuhan Laut Panjang dan Srengsem, serta jalur Ferry Bakauheni menjadikan Kota Bandar Lampung ini semakin penting peranannya.

Bahkan semua hasil-hasil bumi Lampung semuanya dikumpulkan lebih dulu di kota ini sebelum dikirim ke propinsi atau kota-kota lain, demikian pula sebaliknya dari propinsi-propinsi lain digudangkan di sini sebelum dibawa ke daerah-daerah tingkat dua atau pedesaan.

4.2. Agama dan Kemasyarakatan

Sebagai ancaman-perbandingan bagi Kotamadya ini dapat dilihat lebih dulu komposisi pemeluk agama bagi pen-

duduk Propinsi Lampung, yang 95,45% menganut agama Islam, 1,2% beragama Katholik, pemeluk Kristen Protestan 1,03%, serta 2,32% beragama Hindu dan Budha. 2)

Data ini nampaknya memang relevan dengan prinsip adat kemasyarakatan orang Lampung, sebab para responden menyatakan bahwa suku Lampung asli semuanya (100%) menganut agama Islam tidak ada yang menganut agama lain. Adalah cacat menurut adat budaya dan tradisi kemasyarakatan Lampung kalau ada salah seorang warganya terpengaruh menganut agama lain, akan aiblah buai (garis keturunan) mereka jika salah seorang anggotanya menganut agama lain itu, dan orang itu akan disisihkan di daerahnya dan ditinggalkan di dalam aktivitas kemasyarakatan. Hal ini nampak tercermin misalnya dalam perjodohan perkawinan, di mana menurut ketentuan adat mereka, baru dapat menerima orang dari luar suku Lampung, dengan 4 persyaratan yang prinsip, yaitu:

Lampung, dengan 4 persyaratan yang prinsip, yaitu :

1. Orang itu harus beragama Islam; tidak dapat menerima orang yang tidak menganut agama Islam, meskipun memiliki kekayaan/jabatan yang tinggi. Atau diharuskan memasuki agama Islam lebih dulu, barulah dapat diterima sebagai anggota keluarga
 2. Tidak keturunan zinā (lacur); orang Lampung sangat hati-hati di dalam memilih orang (calon) untuk jodoh anaknya. Sebelumnya harus diteliti/diketahui secara jelas asal-usul keturunannya, difahami secara terang tentang orang tua dan nenek moyangnya. Hal ini dimasukkan untuk menjaga kebersihan/kemurnian garis keturunan di kemudian hari
-
- 2) Man Hasan Ketua Bappeda Propinsi Lampung, *Kebijakan Dalam Pemberngunan Agama Empiris* (Telukbetung Bappeda Propinsi Dati I Lampung, 1983) hal. 3.

3. Tidak keturunan rampok; artinya tidak berasal dari orang tua/nenek moyang manusia yang bejat moralnya, seperti : pencuri, penipu, perampok, dan sebagainya. Sebab watak penipu, pencuri dan pembohong itu dapat turun temurun pula kepada anak-anak dan cucunya kelak. Hal itulah yang ingin dihindarkan dan dijaga untuk tidak terjadi pada anggota keluarga, baik keluarga batih maupun keluarga besar/keluarga suku/buai.
4. Tidak keturunan batuk darah; maksudnya ialah tidak berasal dari orang tua (silsilah) orang yang pernah dihinggapi oleh sesuatu penyakit yang menular dan berbahaya, seperti : batuk darah, TBC, penyakit gila dan sebagainya yang dapat menular kepada keluarga serumah maupun anak keturunan yang akan datang.

Penyakit gila memang dapat menurun kepada anak, cucu atau keturunan selanjutnya lagi. Peribahasa Adat Lampung menyebutkan:

"Ati-ati jamo manduso,
sebab manduso lak tettu manduso.

Harto bando mak jadi ukuran manaktukan jodoh perkawinan. 3).

Maksudnya : "Hati-hati sama manusia,
sebab manusia belum tentu manusia.
Harta benda tak menjadi ukuran dan menentukan
pilihan untuk perkawinan.

Harus hati-hati memilih manusia, sebab ada manusia yang perbuatan dan sifat-sifatnya tidak manusiawi. Kalau ditemui yang demikian, kita harus memanusiakan manusia itu, yakni membina/mendidiknya agar menjadi baik sebagai manusia.

3) A. Sanusi PPA (Pangeran Puseran Agung), *Wawancara*, September 1983.
dan beberapa respondent lainnya.

Dari 4 prinsip adat orang Lampung ini jelas tercermin bahwa point 1, 2, dan 3 adalah bermotifkan agama yang kuat sekali, jiwa keagamaan yang mendalam, yang dengan begitu jauh menaati konsepsi-konsepsi ajaran Islam oleh para pemimpin buai/pemuka-pemuka adat.

Sedangkan point 4 adalah bermotifkan kesehatan, yakni demi menjaga kesehatan keluarga dan garis keturunan pada generasi-generasi berikutnya kelak.

Di Kotamadya Bandar Lampung ini, dalam hal komposisi agama menurut data tahun 1980 (sebelum pemekaran kota) terdapat penganut agama yang beragam pula, yakni 251.391 orang pemeluk agama Islam (\pm 92,5%), penganut agama Budha berjumlah 15.029 orang (\pm 4%) yang umumnya terdiri dari orang-orang Cina, Katholik berjumlah 5.291 orang (\pm 1,22%), Kristen Protestant dan lainnya 7.551 orang (\pm 2,13%) dan penganut agama Hindu sejumlah 520 orang (\pm 0,15%).⁴⁾

Sesudah pemekaran kota ini dengan jumlah penduduk yang meningkat hampir 2 x lipat dari sebelumnya dan yang telah mencapai sekitar setengah juta orang, persentasi di atas menjadi sedikit bergeser menjadi \pm 94,25% adalah penganut Islam, penganut agama Budha \pm 2,5%, Kristen Protestan dan lainnya \pm 2%, Katholik \pm 1,10% dan penganut Hindu sekitar 0,15%).⁵⁾

Integrasi pemeluk antar agama itu adalah baik sekali, tidak terjadi bentrokan-bentrokan antara penganut berbagai agama tersebut, toleransi dan kerjasama mereka dapat dinilai

-
- 4) BKKBN, Kumpulan Data Kependudukan Indonesia, Edisi ke 2 (Jakarta : Biro Data Kependudukan, 1982) halaman 81.
 - Lihat pula : Biro Pusat Statistik, *Penduduk Sumatera menurut Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya Hasil Pencatatan Lengkap sensus Penduduk 1980 (Jakarta : BPS, 1981)* hal. 223.
 - 5) Bandingkan pula dengan footnote No. 2 yang lalu mengenai Komposisi Penganut Agama di Propinsi Lampung (dalam scope yang lebih luas).

bagus, termasuk didalam peringatan-peringatan hari-hari besar nasional.

Suatu kepribadian masyarakatnya yang dapat menahan diri dan tidak banyak bergerak merupakan faktor yang amat membawa suasana tenang di daerah ini, yang merupakan pula pengaruh iklim daerah dan alam yang membuat masyarakatnya pula belum dinamis, malah sering apatis dan tidak mau tahu/masa bodo. Pengaruh kepribadian kota dan sifat-sifat menjurus individualis juga mulai kelihatan, meskipun dalam beberapa hal sifat-sifat toleransi yang besar juga mudah berlaku, dan umumnya orang tidak suka memperpanjang sesuatu masalah, mau cepat selesai dan damai, semuanya bisa diatur. Meskipun kadang-kadang terjadi juga bentuk-bentuk usaha menarik orang yang telah memeluk sesuatu agama agar memeluk agama lain secara halus dan tidak nyata, namun biasanya hanya sampai pada reaksi protes dan penyampaian permasalahannya kepada pihak yang berwenang, lalu hal itu cepat dapat diatasi dan diselesaikan sebagaimana mestinya/sebagaimana baiknya.

4.3. Suku Asli Lampung

Menurut data yang dikeluarkan oleh Pemda Kotamadya Bandar Lampung tahun 1983 yang lalu, bahwa setelah perluasan kota, maka jumlah penduduk dari suku Lampung asli meningkat jumlah persentasinya menempati posisi kedua setelah suku Banten Sunda, yakni 20,5% (posisi pertama adalah suku Banten Sunda = 35,5%).

Sebelum perluasan kota ini, mereka berada pada urutan ke - 3 dalam jumlah, dengan persentasi kurang dari 20. Ini berarti bahwa orang Lampung lebih banyak yang tinggal di desa-desa atau daerah pinggiran kota ini, sedangkan dominasi kegiatan kota dikuasai oleh para pendatang, terutama sektor perdagangan, transportasi, perburuhan/bidang jasa, perhotelan, dan

sebagainya. Bidang-bidang tersebut (kecuali perburuhan) kentara sekali didominasi oleh Cina, juga Minang serta suku-suku lain menyusul pada urutan selanjutnya.

Kegiatan orang-orang dari suku Lampung ini terutama menonjol memiliki tanah-tanah pertanian/kebun kopi, lada, cengkih, dan kelapa, yang buruh-buruh pekerjanya sendiri diambil dari mereka yang datang dari Jawa atau Banten. Sistem seperti ini telah berjalan sejak lama sekali, kira-kira telah bermula pada abad ke - 16 dan 17 tatkala Lampung berada di bawah pengaruh Kerajaan Banten, dan Banten memonopoli membeli hasil-hasil bumi Lampung untuk dijual kepada bangsa-bangsa Eropa yang ramai berhubungan dagang dengan kerajaan itu.

Pada masa itu para saudagar dari Banten di samping membawa uang untuk membeli hasil-hasil bumi Lampung, mereka juga membawa banyak tenaga pekerja untuk memungut hasil-hasil perkebunan itu, bahkan untuk mengerjakan serta merawat perkebunan itu pula dan semua pekerjaan pengurusan kebun itu pada umumnya.

Jadi orang Lampung tinggal bersih menerima uang sambil menunjuk lokasi kebunnya. Nampaknya cara-cara demikian memang disenangi oleh orang-orang Lampung yang memang tidak berbakat untuk bekerja kasar/bekerja berat, yang suka hidup senang dan cenderung memiliki sifat-sifat feodal. Bila menjadi pegawai, mereka ingin berada pada tingkat yang di atas dan menjadi kepala/kepala bagian, amat tidak menyenangkan bagi mereka pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak mengandung gengsi atau menjadi bawahan, seperti bagian *cleaning service* pada suatu kantor, pesuruh, atau pekerja kasar lainnya, dan jika ia menjadi kepala, maka membawa tas pun mesti ada orang lain yang membawakannya, meskipun itu hanya dari mobil ke ruangan kantor, dan dari mobil ke dalam rumah dan sebaliknya.

Jika akan menjadi pedagang, mereka hanya mau langsung menjadi pedagang besar, atau setidak-tidaknya pedagang menengah, tidak merasa perlu untuk lebih dulu menjadi pedagang kecil yang mulai dari bawah, meskipun sebenarnya pengalaman dari awal dan bawah/dasar itu sangat bermanfaat bagi kematangan dan kemajuan yang langgeng dan merupakan modal dasar yang vital.

Bergaul dengan orang Lampung terutama dari golongan adat Pepadun Abung terasa sulit, tetapi juga amat mudah. Jika belum kenal baik dengan mereka, orang akan merasa terpisah/terpencil sendiri, tidak saling menawarkan, mungkin juga tidak saling menyapa. Tetapi jika telah dikenalnya dengan baik dan bisa pula bergaul dengan mereka secara ramah serta jur-jur, mereka juga sangat pemudah dan sosial sekali, mau berkorban secara besar-besaran, malah kelihatan royal dan sangat malu jika akan ketahuan kekurangan atau ketiadaan sesuatu pada dirinya, atau pada rumah tangganya, karena itu mereka selalu berusaha rapi dan serba lengkap.

Jika baru mengenal mereka secara selintas, kelihatan mereka bersifat tertutup dan acuh tak acuh, tetapi jika telah bergaul rapat dan saling mempercayai mereka sebenarnya terbuka malah cenderung lugu/polos apa adanya.

Jika dikritik, mereka cepat memberi reaksi menolak, tetapi bila disampaikan secara baik-baik dan jika memang kritik itu obyektif, mereka akan menerimanya dan mengakui. Kalau dikasari mereka bisa berbalik menjadi marah dan malah dendam, tetapi jika memang bersalah mereka amat ketakutan dan malu, menjadi diam lagi pasif.

Mereka memiliki rasa harga diri yang tinggi sekali. Yang mereka sebut dengan Istilah *fill pesanggiri*, yaitu rasa harga diri yang tidak boleh sekali-kali disinggung/direndahkan/dihina, tetapi jika awal kesalahan memang sebenarnya ada

pada dirinya atau dimulai pada dirinya, dia juga lekas sadar dan sanggup menahan diri serta sabar. Untuk hal yang seperti itu mereka tak perlu cepat dikerasi/dikasari, lebih baik disampaikan secara tenang dan melalui unsur perasaan mereka, dia biasanya akan menyesal dan sadar.

Suku Lampung itu terbagi atas beberapa kesatuan sistem adat istiadat, yakni :

- 1) Abung
- 2) Wai Kanan
- 3) Sungkai
- 4) Tulangbawang
- 5) Pubian

Kelimanya memakai sistem *Pepadun*. Pepadun berasal dari nama "kursi kebesaran"/tempat duduk kepala marga/ketua *clan*, yang disebut dengan "*Penyimbang*".

Mereka mempunyai sistem tata cara adat yang tertentu sejak nenek moyang yang turun temurun dan tetap berlaku sampai sekarang. Nampaknya peribahasa adat Minang Tak Lapuk Kena Hujan – Tak Lengkang Kena Panas, juga berlaku pada adat Lampung, hingga lestari dan berkembang terus, termasuk dalam hal memakai gelar-gelar kehormatan yang amat disukai, meskipun mereka sudah tergolong intelektual maupun pejabat tinggi.

Kuat memegang adat istiadat ini akan kelihatan sekali seperti pada upacara perkawinan, pengangkatan menjadi kepala keluarga besar (*baai*) atau keluarga batih, dan banyak acara-acara adat lainnya yang bersifat kemasyarakatan atau desa.

Rasa ikatan kekeluargaan dan kesukuan mereka juga amat kuat, dan saling membela sekuat daya dengan moral, materiil ataupun tenaga serta hal-hal lain yang mampu. Anak lelaki tertua bertanggungjawab terhadap adik-adiknya, malah menyediakan rumah untuk adik lelakinya yang akan kawin,

sebab menurut adat pula bahwa seorang lelaki yang akan kawin harus mampu menyediakan peralatan secukupnya termasuk alat-alat rumah tangga/perabotan. Setidak-tidaknya si isteri dibawa tinggal di rumah orang tua si suami dan menjadi jaminan mereka sepenuhnya, malah si isteri lepas sama sekali dari keluarganya. Tetapi bila terjadi perceraian maka si isteri pun kembali ke rumah orang tuanya tanpa membawa sesuatu harta benda pun, namun pada kesatuan adat Pepadun jarang sekali/hampir-hampir tak terjadi perceraian suami isteri, di mana menurut adat si isteri harus patuh sepenuhnya kepada suami, mesti bisa menyesuaikan diri.

Agak berbeda pada adat Pesisir, di mana di dalam masyarakatnya banyak juga terjadi perceraian itu, dan 6 kesatuan adat Pesisir/Peminggir itu adalah :

- 1) Peminggir Belalu/Ranau
- 2) Peminggir/Pesisir Krui
- 3) Pesisir Semangka
- 4) Pesisir Teluk
- 5) Pesisir Rajabasa
- 6) Pesisir Melinting-Meringgai.

Keenam kesatuan adat Peminggir/Pesisir ini memang bertempat tinggal di daerah pinggiran Propinsi Lampung di pesisir pantai bagian barat, selatan dan timur. Ada pendapat yang membedakan antara Peminggir dan Pesisir itu. Peminggir adalah orang-orang yang berdiam di bagian sebelah pinggiran dari daerah Lampung, seperti: di daerah Krui dan sekitarnya dan Belalu Ranau dan sekitarnya pula, termasuk sebenarnya orang-orang dari suku Komering dan Kayu Agung yang terletak di utara Propinsi Lampung dan menjadi daerah Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan namun berasal dari satu rumpun suku Lampung.

Dari sejarah asal-usul keturunan mereka dinyatakan bahwa kesatuan suku adat Peminggir itu adalah seosal keturunan dengan Abung, Wai Kanan, Sungkai, Tulangbawang, dan Pubian, yakni semuanya berumpun asal dari Skala Brak, suatu daerah dataran tinggi di kaki Gunung Pesagi di Kecamatan Kinali (Belalalu) Kabupaten Lampung Utara, termasuk pula kesatuan adat suku Komering dan Kayu Agung yang berdiam di sekitar sepanjang Sungai Komering (dewasa ini termasuk di dalam daerah Propinsi Sumatera Selatan).

4.4. Sejarah asal-usul

Sedangkan suku Pesisir Semangka, Teluk, Rajabasa dan Melinting Meringgai adalah berasal-usul dari keturunan suku Banten dan Percampuran suku Lampung dan Banten dan keturunan-keturunan selanjutnya.

Pada tahun 1525 setahun sebelum merebut Sunda Kelapa (1526) Fatahilah (Sunan Gunung Jati) pernah bersama rombongannya pergi ke daerah Lampung bagian paling selatan dan tinggal di sana selama beberapa waktu dalam rangka pengembangan Agama Islam. Pada waktu itu Fatahilah diambil sebagai mantu oleh Ratu Pugung yang dikawinkan dengan anaknya yang bernama Putri Sinar Alam, lalu melahirkan putra yang bernama Putri Sinar Alam, lalu melahirkan putra yang bernama Minak Kejala Ratu yang nantinya menjadi cakal-bakal Keratuan Darah Putih yang selanjutnya merupakan hubungan silsilah bagi Raden Intan Pahlawan dari daerah Lampung melawan Belanda sampai dengan tahun 1856.

Di masa pemerintahan Minak Kejala Ratu sebagai raja ⁷⁾ dari Keratuan Darah Putih di Lampung dan Maulana Sultan

7). Orang Lampung lazim menyebut Raja itu dengan sebutan RATU. Keratuan itu maksudnya adalah Kerajaan. Sebutan Ratu disini tidak berarti adalah *Raja Wanita* atau isteri raja, dan sebutan Ratu itu dimaksudkan adalah orang yang memegang peranan utama. Jadi gelar *Ratu Perwiranegara* pada Letjen. Purnawirawan Alamsyah, maksudnya adalah *Raja Perwiranegara*, gelar adat yang mencerminkan cita-citanya.

Hasanuddin (1550 – 1570) yakni saudaranya (kakak) seayah dari Kerajaan Banten terjalin hubungan yang sangat erat serta perjanjian saling membela dan membantu antara Lampung dan Banten. Bila salah satu kerajaan itu diserang oleh musuh, maka yang lain berkewajiban membantu dengan pasukan maupun biaya perang. 8)

Mengenai asal-usul dari suku Lampung : Abung, Wai Kanan, Sungkai, Tulang bawang, Pubian, Komering dan Kayu Agung serta Peminggir/Pesisir itu berawal dari Skala Brak itu, sebelum bermukim di tempat itu, mulanya cakal-bakal mereka datang dari daerah Pagaruyung dengan pengatur/pengirim rombongannya bernama "Sang Guru Satti" atau lebih dikenal dengan panggilan "Datu di Pagaruyung".

Sang Guru Satti ini mempunyai 3 orang anak yang masing-masing dikenal dengan : Sang Bebatak, Sang Bebugis, dan Sang Begeduh. Didorong oleh keinginan mencari daerah baru, maka ketiga keturunan datu di Pagaruyung itu menyebar mengambil arahnya masing-masing, yakni:

1. Sang Bebatak bergerak ke utara dan dikatakan menurunkan suku Batak
2. Sang Bebugis menuju ke arah timur menyeberang Selat Malaka, selanjutnya ke Kalimantan dan terus pula ke Sulawesi, lalu menurunkan suku Bugis
3. Sang Begeduh pergi ke arah timur menuju ke selatan Sumatera dan sampai di daerah dataran rendah alluvial, kemudian terus lagi ke daerah Dataran Tinggi Ranau. Pada suatu ketika terjadi bencana alam meletusnya gunung berapi yang menghasilkan Danau Ranau sekarang. Rombongan terpaksa berpidah lagi ke arah

8) Hilam Hadikusuma, *Sejarah dan Adat Istiadat Lampung* (Teluk betung : Fak. Hukum Unila, 1978). hal. 47 – 50.

selatan sampai di Bukit Pesagi Skala Brak⁹⁾ yang selanjutnya merupakan cakal-bakal orang Lampung/Suku Lampung sekarang¹⁰⁾.

Diperkirakan bahwa poyang-poyang orang Lampung yang hidup di Bukit Barisan Skala Brak itu adalah pada abad ke -13 atau kira-kira sezaman dengan Kerajaan Pagaruyung Minangkabau yang didirikan oleh Adityawarman tahun 1339. Di dalam *Kitab Kuntara Raja Niti* (pedoman raja-raja memerintah) yaitu kitab adat istiadat orang Lampung, yang hingga sekarang masih dapat diketemukan dan dibaca, baik di dalam aksara asli Lampung maupun sudah ditulis di dalam aksara Latin bahwa orang Lampung (Pubian, Abung, Peminggir/Pesisir, dan lain-lain) berasal dari Pagaruyung.

Kemudian setelah kerabat mereka berdiam di Skala Brak, maka di masa cucunya Umpu Serunting mereka mendirikan *Keratuan Pemanggilan*.

Umpu Serunting ini menurunkan anak lelaki 5 saudara yaitu :

- 1) *Indra Gajah* yang menurunkan orang Abung
- 2) *Blunguh* menurunkan orang Peminggir
- 3) *Pak Lang* menurunkan orang Pubian

9). Skala Brak adalah 2 kata yang menjadi satu Kata Majemuk bahasa Lampung. Skala adalah sejenis pohon Nibung yang buahnya juga dapat dimakan bila telah cukup matang. Brak artinya luas. Pada zaman dahulu di daerah itu tumbuh pohon Skala pada suatu areal tanah (lapangan) yang sangat luasnya sesayup-sayup mata memandang.

10). Abdullah A. Soebing, *Kedatuan di Bukit Keratuan di Muara. Catatan ringkas tentang Lampung Sebuway* (Bandar Lampung: Buway Subing, 1983) halaman 3-4.

LIHAT PULA : Team Penelitian Fakultas Keguruan Universitas Lampung, *Penyusunan Sejarah dan Kebudayaan Lampung Historiografi Daerah Lampung* (Tanjungkarang: Proyek Peningkatan/Pengembangan Perguruan Tinggi Unila, 1975/1976 halaman 16.

- 4) Pandan dikatakan menghilang
- 5) Sangkan dikatakan ada di Sukadana Ham

Selanjutnya sebagaimana yang diuraikan di dalam Kitab Kuntara Raja Niti, dikarenakan orang-orang Bajau (Perampok/Bajak Laut) datang menyerang, maka Keratuan Pemanggilan itu menjadi pecah, dan warga masyarakatnya beralih tempat meninggalkan Skala Brak ke daerah Dataran Rendah Lampung sekarang sekitar Abung.

Keturunan Indra Gajah kemudian menetap di Ulok Tigou Ngawan di Canguk Ratcak di hulu Wai Abung (Kecamatan Tanjungraja Lampung Utara) di bawah pimpinan Minak Rio Begeduh, mereka mendirikan *Keratuan di Puncak*.

Di masa Pemerintahan Minak Rio Begeduh ini pernah armada Majapahit singgah di pantai bagian timur Di daerah kekuasaan Keratuan Pugung (Kecamatan Labuhan Meringgai sekarang) sekitar tahun 1365, tetapi tidak sampai masuk ke daerah pedalaman.

Kemudian di masa kekuasaan putra dari Minak Rio Begeduh, yaitu : *Minak Paduka Begeduh*, daerah Abung diserang lagi oleh perampok/bajak laut, yang mengakibatkan tewasnya Minak Paduka Begeduh.

Hal itu menyebabkan keempat anak dari Minak Paduka Begeduh, yaitu: *Unyai* (bergelar Minak Trio Diso) membuat benteng-benteng pertahanan di sepanjang Wai Abung dan Wai Ramen yang merupakan daerah kekuasaannya.

- 1) *Unyi* (bergelar Ratu di Bumi) membuat benteng-benteng pertahanan di sepanjang Wai Seputih
- 2) *Uban* (Putri) dengan suaminya membuat benteng-benteng pertahanan disepanjang Wai (sungai) Batanghari
- 3) *Subing* (bergelar Minak Abung Jayo) membuat pertahanan di sepanjang Wai (sungai) Terusan

Akhirnya setelah beberapa lama, Subing berhasil menebus kehormatan ayahnya yang terbunuh itu, yakni dengan membunuh pula komandan dari perampok/bajak laut itu, dan kepalanya ditanam (dikubur) di bawah kaki makam almarhum Minak Paduka Begeduh, sedangkan badan dari komandan perampok bajak laut itu dikubur di tempat mana ia dibunuh.¹¹⁾

4.5. Dari Asia Selatan

Di samping itu pendapat yang lebih jauh lagi tentang asal-usul orang Lampung tersebut menyatakan bahwa suku Lampung ini termasuk pula Minangkabau, Batak, dan Bugis tersebut adalah semuanya berasal dari Asia bagian selatan, yaitu dari dataran tinggi Yunnan dan Tibet (suatu daerah di propinsi Negara Tiongkok sebelah selatan) di bagian utara dari Negaraneutra Birma, Muang Thai dan Laos di sekitar hulu Sungai Mekong yang mengembang mengikuti aliran sungai itu menuju ke selatan melalui daerah-daerah Negara Kamboja dan Vietnam, dan akhirnya sampailah ke Indonesia setelah lebih dulu melayari/menyeberangi Laut Cina Selatan.

Jalan lain lagi yang mereka lalui oleh sebagian mereka pula ialah melayari Sungai Salween di Birma dan terus mengarungi Laut Andaman yang akhirnya mendarat di Pulau Sumatera.

Di Pulau Sumatera ini mereka pun makin lama semakin berkembang jumlahnya. Seterusnya mereka menyebar menuju berbagai tempat dan penjuru daerah-daerah pulau ini untuk mencari tanah-tanah pertanian yang subur, karena pada

11). Hilman Hadikusuma *Op.cit.* halaman 44-47.

Bungai Rampai Adat Budaya, No. 2 tahun II hal. 4-30.

Team Penelitian Fakultas Keguruan Universitas Lampung, *Op.Cit.* halaman 64-66.

H. Ahmad Muchlisin (Pensiunan Gubernur Muda Propinsi Lampung - 69 tahun), *Wawancara*, Oktober 1983. dan beberapa orang responden lainnya.

zaman itu mereka bercocok tanam masih dengan cara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain mencari tanah-tanah yang subur buat ditanami, sebab mereka belum mampu belum tahu cara-cara mengolah tanah secara intensif, apalagi memberi pupuk/menyuburkannya untuk melipatgandakan hasil.

Dasar pemikiran ini dapat dilihat dari ciri-ciri bentuk tubuh, warna kulit, profil wajah maupun sifat-sifat pembawaan yang banyak persamaannya.

Tentang komposisi penduduk Propinsi Lampung yang luasnya ± 35.376, 50 km² itu adalah bahwa ± 25% adalah suku Lampung asli dan ± 75% lainnya adalah para pendatang, yang terdiri banyak suku termasuk transmigrasi dari Jawa yang pada zaman Belanda disebut kolonisasi.

Tahun 1983 diperkirakan penduduk Propinsi Lampung lebih dari 5 juta jiwa. Dalam hal ini jumlah asli Lampung dengan tiap-tiap bagiannya kira-kira telah mencapai angka:

1) Abung	± 500.000	jiwa
2) Wai Kanan	± 150.000	jiwa
3) Sungkai	± 55.000	jiwa
4) Tulangbawang	± 75.000	jiwa
5) Pubian	± 100.000	jiwa
6) Krui	± 70.000	jiwa
7) Belalau	± 60.000	jiwa
8) Semangka	± 70.000	jiwa
9) Teluk	± 65.000	jiwa
10) Rajabasa	± 55.000	jiwa
11) Melinting Meringgai	± 45.000	jiwa
<hr/>		
Jumlah	± 1.245.000	jiwa

Terutama sebelum Perang Dunia II pada umumnya penduduk asli Lampung bermata pencaharian meramu hasil-hasil

hutan (rotan, damar, dan lain-lain), bertani ladang secara berpindah-pindah, berkebun tanaman keras, seperti : lada, kopi, karet, cengklik, dan lain-lain, beternak kerbau liar, menangkap ikan di sungai atau rawa-rawa dan juga ditepi laut dan sejak 3 atau 4 dekade terakhir ini telah banyak pula beralih kegiatan mereka menjadi pedagang, pegawai, dan berbagai bidang lainnya.

4.6. Struktur Sosial dan Sistem Budaya

Di antara 11 bagian-bagian kesatuan adat suku Lampung itu, maka Abung merupakan yang terbanyak jumlah anggotanya dan menempati areal yang paling luas pula, dan kekerabatan Abung ini juga merupakan yang paling menonjol dengan sistem adat pepadunnya. Kesatuan Adat lainnya yang memakai sistem pepadun itu adalah : Wai Kanan, Sungkai, Tulangbawang dan Pubian. Dari 11 kesatuan adat tersebut, masing-masingnya berbeda pula dialek bahasanya di samping perbedaan sistem-adat-istiadat itu.

Untuk lebih jelasnya di sini dibikin "ranji" tentang dialek bahasa daerah dan dari kesatuan sistem adat istiadatnya masing-masing itu, sebagai berikut:

DIALEK BAHASA DAERAH LAMPUNG

Dialek "O" (Adat Pepadun)
(Abung)

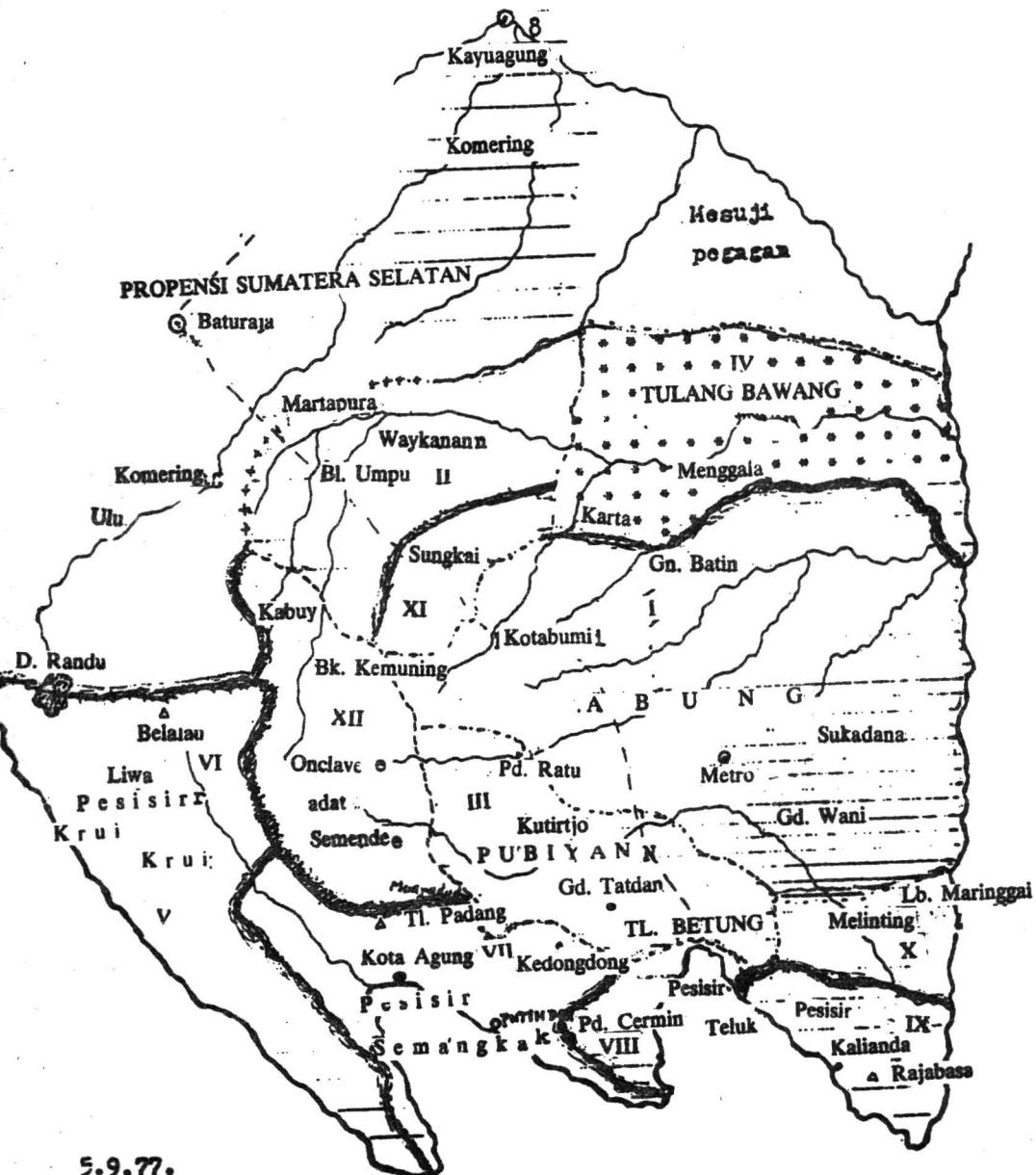
1. Abung
2. Tulangbawang

Adat Pepadun

1. Wai Kanan
2. Sungkai
3. Pubian

1. Melinting Maringga
2. Pesisir Rajabasa
3. Pesisir Teluk
4. Pesisir Semangka

PETA LINGKUNGAN BAHASA DAN ISTIADAT LAMPUNG



Dialek "A" Adat Pesisir
(Belalau)

5. Pesisir Krui
6. Peminggir Belalau/Ranau
7. Komering Sumsel.
8. Kayu Agung

Kesatuan adat Abung mempunyai 9 persekutuan kebuarian (marga) yang lazim disebut dengan Abung Siwomego artinya "Abung 9 Marga".

Dari 9 marga tersebut, 4 di antaranya berasal dari satu ayah yang bernama "Minak Paduka Begeduh" yang mempunyai dua orang isteri ratu. Dari isteri ratu yang pertama lahir 3 orang anak yaitu:

(1). Unyai dengan gelar Minak Trio Diso. Selanjutnya membentuk marga (buai) Nunyai, yang berkedudukan di sekitar Kotabumi (Lampung Utara).

(2). Unyi dengan gelar Minyak Ratu Dibumi. Selanjutnya membentuk marga (buai) Unyi, yang berkedudukan di sekitar Wai (Sungai) Seputih, Gunung Sugih, Lampung Tengah dan daerah-daerah terdekatnya.

(3) Uban (wanita) yang dengan suaminya selanjutnya membentuk marga (buai) Nuban, yang berkedudukan disekitar daerah Batanghari, metro, Lampung Tengah.

(4). Betan Subing dengan gelar Minak Permata Jagat, disekitar Wai (Sungai) Pengubuhan, yakni daerah *Terbanggi* (Lampung Tengah).

Di samping berdasarkan ikatan hubungan daerah dari *satu bapak asal* seperti tersebut di atas terdapat 5 marga lagi. 5 anggota susulan dari persekutuan *Abung Siwo Migo* ini yang berdasarkan adopsi (saudara angkat) yang lazim mereka sebut dengan istilah Mewari. Kelima marga tersebut telah disepakati sejajar (satu ranking) sesuai dengan peribahasa adat "duduk sama rendah, tegak sama tinggi", bagi sesama kepala-kepala marga (buai) itu serta sesama rakyat antar marga-marga itu

pula. Lima marga yang telah disepakati secara bulat tersebut, biasa pula disebut dengan Kebuiani Wari Tanjar, yakni saudara-sejajar, yang terdiri atas:

- (5) Marga Buai Selagai, berkedudukan di Tanjungbatu (Selagai).
- (6) Marga Buai Kunang, berkedudukan di Ajikagungan (Kotabumi)
- (7) Marga Buai Beliyuk, berkedudukan di Tanjungratu (Terbanggi)
- (8) Marga Buai Aji (Anak Tuhou), berkedudukan di Padangratu (Lampung Tengah).
- (9) Marga Buai Nyerupa, berkedudukan di Komering Seputih.

Mengenai tingkat-tingkat kepemimpinan di dalam masyarakat Adat Abung Sewo Mego tersebut meliputi urutan-urutan sebagai berikut:

1) *Penyimbang Pepadun Tua Marga*, yakni sebagai pimpinan tertinggi dari kesatuan Adat Abung dari ke 9 marga yang ada didalam persekutuan itu. Biasanya diduduki oleh penyimbang tertua dari marga (buai) tertua, yakni: Unyai. Tetapi hanya mempunyai wewenang seremonial saja dan hanya di-dalam upacara-upacara adat tertinggi/yang tertentu saja. Dia diangkat oleh sidang (prowatin) para penyimbang (kepala-kepala kesatuan adat) dan bertempat di Balai Adat. Namun karena ia adalah pula penyimbang bumi yang mengetuai kebuaiannya sendiri (salah satu dari yang 9 itu/biasanya Unyai) dan ia berwenang mengatur adat kebuaiannya sendiri itu, meskipun tidak berwenang mengatur adat kebuian lainnya yang 8 lagi anggota Sewo Migo.

2) *Penyimbang Bumi* (Penyimbang Buai) yang mengepalai masing-masing kebuiani yang ada, yakni 9 penyimbang bagi 9 buah buai didalam Abung Siwonego. Jadi masing-masing

kebuarian tersebut ada mempunyai penyimbangnya sendiri-sendiri. Penyimbang bumi adalah yang berkuasa dan menjadi kepala (*voorzitter*) di dalam kesatuan adat pepadun yang bersangkutan, ia diangkat dari anak lelaki tertua dari isteri Ratu (isteri resmi dengan begawe) yang pertama dari penyimbang.

3) *Penyimbang ratu*, yaitu penyimbang kedua, yang merupakan calon penyimbang bumi menggantikan kakaknya apabila tidak dapat lagi melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penyimbang. Dia disebut pula dengan istilah *Pepang Penyambut* dari penyimpang bumi, dan statusnya adalah sebagai *onder-voorzitter* di dalam adat Pepadun itu, dan ia adalah merupakan anak lelaki kedua dari isteri yang berstatus rabu (seibu sebapak dengan kakaknya yang menduduki kursi penyimbang bumi/penyimbang pepadun tersebut).

4) *Penyimbang Batin*. Yakni ranking wewenangnya di dalam adat Pepadun yang bersangkutan, yakni dibawah penyimbang ratu. Penyimbang Batin berperanan sebagai komisaris, ia anak lelaki pertama dari isteri kedua yang disebut isteri bangsawan. Jadi ia adalah saudara seayah berlainan ibu dengan penyimbang 1, 2, dan 3 di atas. Dia pun memimpin satu belahan atau cabang dari buainya pada suatu daerah lokasi (desa) tertentu.

5) *Penyimbang Rajo*. Yaitu penyimbang ranking ke-4 dan berwenang sebagai komisaris ke - 2 setelah penyimbang batin. Penyimbang rajo ini adalah anak lelaki tertua dari isteri ke -3 sang ayah. Jadi dia hanya seayah dengan penyimbang 1,2, dan 3 di atas yang berlainan itu.

Penyimbang rajo pun memimpin suatu belahan baru atau cabang dari suatu kebuarian pada suatu daerah lokasi desa tertentu.

Secara kronologis dapat disusun perkembangan dari sistem kekerabatan dan Persekutuan dari Hukum Adat Abung ini, yakni:

- (1) *Masa Keratuan di Puncak* (sekitar abad ke 14 s. d. 15), yakni semenjak dari masa Skala Brak, kemudian menyebar menuju daerah-daerah yang luas, lalu menetap di Canguk Gracak di bawah pimpinan Minak Rio Begeduh menjadi pimpinan tertinggi sebagai penyimbang keratuan (kerajaan), yang merupakan pemerintahan kerabat/keturunan (genealogis).
- (2) *Masa Pemerintahan Persekutuan 3 Buai* (sekitar abad 16-17) diketuai oleh Minak Trio Diso : Tiga orang putra dari Minak Paduka Begeduh, yakni : Unyai (gelar Minak Trio Diso). Unyi dan Subing masing-masing merupakan pimpinan tertinggi dari buainya dengan daerah kekuasaan tertentu pula. Lalu membentuk persekutuan untuk menjadi lebih kuat dan kompak guna menghadapi segala kemungkinan dan musuh yang sering.
- (3) *Masa Abung Sewomigo* (sekitar abad ke - 18). Suatu sistem keterbukaan adat telah diperlakukan sejak zaman Minak Trio Diso, yakni adanya sistem Mewari (adopsi) untuk menjadi anggota adat Abung bagi orang-orang dari luar, dimana orang-orang yang diadopsi ini menjadi sama hak dan kewajibannya di dalam kemasyarakatan dan adat, dan mereka pun menjadi pimpinan (penyimbang) pula pada buai masing-masing. Di samping itu ada pula di antara penyimbang-penyimbang tersebut yang melakukan "Seba" ke Banten. Penyimbang-penyimbang yang telah seba dan para penyimbang yang atas persepakatan yang disyahkan oleh prowatin, lalu membentuk persekutuan bersama, yakni sebanyak 9 migo, termasuk keturunan dari Minak Trio

SEBA adalah suatu kunjungan kehormatan kepada Raja Banten disertai membawa sesuatu oleh-oleh/tanda mata, juga mempelajari berbagai hal, termasuk Agama, Pemerintahan dan kemasyarakatan. Lalu Penyimbang tersebut mendapat sesuatu pengakuan dari Raja Banten, dan sepulangnya kembali ke Lampung, gengsinya menjadi terangkat dimata rakyat.

Diso sebagai penyimbang inti, yang akhirnya lazim disebut dengan Abung Sewomigo.

(4) *Masa Persekutuan Hukum Adat Genealogis yang Terbatas Menurut Wilayah Marga Territorial (sejak 1928).*

Yakni semenjak Pemerintah Hindia Belanda menetapkan sistem pemerintahan marga-marga territorial di daerah Lampung. Karena terdesak oleh Peraturan Pemerintahan Hindia Belanda tersebut maka sidang-sidang (keprowatin-an) Adat Abung Sewomego tidak lagi merupakan Majelis Prowatin Adat yang tertinggi, tetapi hanya merupakan Majelis Prowatin yang berbentuk Perserikatan Penyimbang-penyimbang Mego (Buai) Abung belaka.

Di samping itu lagi ada pula tingkatan lainnya yaitu Penyimbang Tiyuh untuk suatu kampung tertentu, dan penyimbang suku yang mengetuai suatu genealogis tertentu pada suatu kampung/desa.

Kondisi semacam itu berlangsung sampai dewasa ini dimana Prowatin Adat tersebut tidak lagi berperanan di dalam kepemerintahan masyarakat.

4.7. Aksara (Huruf) Lampung

Suku Lampung memiliki tulisan/huruf (aksara) sendiri yang sampai sekarang masih cukup banyak dipakai oleh warga masyarakatnya di dalam berkomunikasi tulis, terutama oleh generasi tuanya. Di samping itu suku asli Lampung juga mempunyai bahasa daerah tersendiri yang secara garis besarnya dapat dibedakan, yakni berdialek "O" yakni Abung dan Tulang-bawang, serta yang berdialek "A" yaitu Wai Kanan, Sungkai, Pubian dan Pesisir.

Terutama di desa-desa tulisan asli Lampung ini masih banyak berlaku dan nampaknya aksara ini memang telah digunakan sejak lama, terbukti banyak benda-benda peninggalan lama

(dari logam, perunggu, kulit kayu, dan sebagainya) yang ditulis dengan huruf (aksara) Lampung ini, tergolong pada benda-benda bersejarah yang masih tetap disimpan oleh rakyat di desa-desa.

Di kalangan generasi muda, memang tulisan ini nampaknya kurang mendapat perhatian/kurang dipelajari dan kurang dipraktekkan lagi oleh mereka, tetapi pemuka-pemuka masyarakat daerah ini kelihatannya tetap berusaha untuk melestarikan dan memupuknya kembali, hingga tulisan ini mulai diajarkan kembali di sebagian Sekolah-sekolah Dasar di daerah Propinsi Lampung.

"Tulisan Lampung termasuk rumpun tulisan "Kaganga" seperti halnya dengan tulisan Makasar, Bugis, Bengkulu, Rejang dan Pasemah. Tulisan ini di Lampung dinamai juga dengan tulisan "Basaja", sebab huruf-huruf itu berdiri sendiri dia mengandung bunyi "a". Banyak hurufnya tulisan ini sekarang ada 19 buah dan ditambah dengan huruf gha (gra) yang bentuknya lalu menjadi 20 buah. Aksara (huruf) kuno lama hanya 19 buah saja.

Menulis huruf-huruf Kaganga Lampung dimulai dari kiri ke kanan. Besarnya *huruf biasa* (huruf kecil) lebih sedikit dari sepertiga petak kertas tempat menulis. Huruf besar seperti yang terdapat pada tulisan latin tidak ada, hanya huruf kecil itu saja dibesarkan 2 kali. Tulisan Lampung terdiri atas 3 unsur, yakni:

- a. Huruf Induk (Bahasa Lampung : "Kelabai Surat").
- b. Anak Huruf (Bahasa Lampung : "Benah Surat").
- c. Tanda baca

Nampaknya bentuk penulisan ini mengalami perubahan-juga, hingga *aksara lama* dan *aksara baru* semakin nyata perubahan bentuknya. Mungkin dikarenakan perjalanan masa yang telah ratusan tahun dan faktor-faktor kemajuan manusia pula, serta evolusi perubahan cara-cara menulis pula, hingga nampak berubah yang lama dan baru. Bandingkan seperti yang ditulis berikut ini antara Aksara Lama dan Aksara Baru.

Bentuk huruf (AKSARA) Lampung yang LAMA :

— sebanyak 19 huruf —

Bentuk huruf (AKSARA) Lampung yang BARU :

— sejumlah 20 huruf —

4.8. Benda-benda Budaya dan Alat-alat upacara.

Sebagai suatu kebudayaan sistem simbul, suku Lampung pun memiliki benda-benda yang dipakai di dalam berbagai macam upacara adat, dengan makna dan perlambang yang mempunyai arti khusus, yang berlaku sampai sekarang, di antaranya ialah:

- 1) Payung Agung; dipakai pada suatu upacara adat besar, misalnya begawe mengangkat penyimbang, yang merupakan Lambang kebesaran sebagai raja Adat didalam tradisi dan struktur masyarakat.

Payung Agung ini terbuat dari kain dan bergagang (tangkai) kayu bulat yang dihias ukir tatah. Norma untuk adat pepadun ialah : *Warna Putih* bagi penyimbang bumi atau penyimbang marga (kepala adat). *Warna kuning* untuk penyimpang tiyuhan (kampung), dan *Warna Merah* untuk tingkat penyimbang suku (genealogis) pada suatu desa.

Di daerah adat Pesisir, warna itu lebih banyak ragamnya, karena masing-masing kepala adat memiliki warna khusus sendiri-sendiri dengan makna berlainan pula.

(Lihat gambar pada halaman).

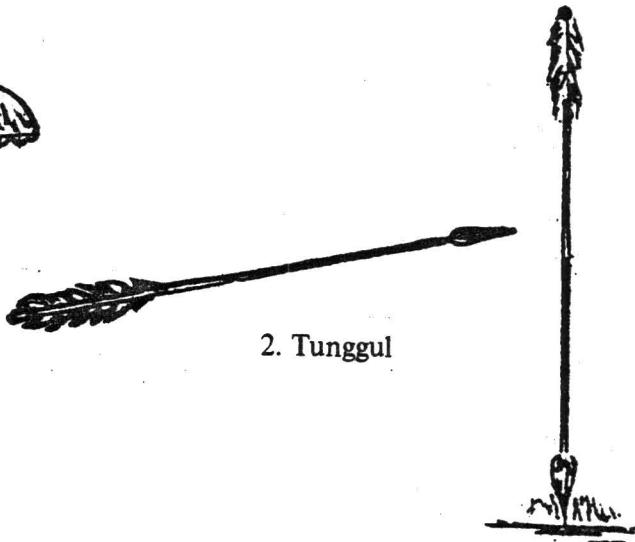
- 2) *Tunggul*; benda simbul adat yang berbentuk tombak, mata tombaknya terbuat dari logam, dan tangkai (gagangnya) terbuat dari kayu, sedangkan pada pangkal tangkai itu diberi hiasan rambu-rambu ekor kuda. Biasanya dipakai untuk upacara Penetapan Kepala Adat, di mana tunggul tersebut ditancapkan pada tanah, dan gagangnya itu dipegang oleh si pembaca keputusan. Benda ini berlaku pada sistem upacara adat Pesisir.
- 3) *Alam*; berbentuk *selendang kain* dan banyak jumlahnya serta beraneka warnanya, selalu digantung pada tiang-tiang kayu secara memanjang atas bawah, di sekitar arena

tempat upacara adat besar, yakni yang merupakan panji-panji kebesaran bagi adat Pepadun.

- 4) *Tandu*; semacam kereta kerajaan; yang mempunyai 2 roda dan 2 kayu penarik di depan sebelah kiri dan kanan. Kereta ini dibuat dari kayu dan berdinding papan, didalamnya ada kursi tempat duduk untuk 2 orang yang dihias dengan indahnya. Kereta raja/kereta hias yang disebut tandu ini digunakan untuk membawa (mengarak) pengantin (mempelai) keturunan raja-raja adat pada upacara perkawinan, yang ditarik oleh manusia dan diiringi pula oleh orang ramai. Bentuk ini biasa dipakai pada masyarakat adat pesisir/peminggir, dan semenjak tahun 1960-an sudah jarang dipakai, dan dewasa ini hampir tak terpakai lagi, kecuali kadang-kadang benar terlaksana juga di desa.
- 5) *Kalasa*; yaitu panggung upacara adat. Panggungnya sendiri hanya rendah saja, tetapi dikelilingi dengan bangunan yang cukup besar batu luas dengan tiang-tiang dan bahan-bahan lainnya dari kayu dan papan, atap dari daun kelapa atau Ijuk (kalau sanggup memperolehnya), dan di sekelilingnya di dinding dengan kain, serta diberi pula hiasan-hiasan dengan daun kelapa pula yakni yang masih muda. Kalasa panggung upacara adat ini biasanya dipergunakan di daerah Krui dan sekitarnya/di daerah pesisir.
- 6) *Adadap*; yaitu kembang telor. Pada waktu upacara cukuran bayi yang baru lahir (biasanya umur 7 hari atau biasa juga lebih). Ini nampaknya termasuk salah satu sistem upacara di dalam *life circle*, yang biasanya diundang para tetangga dan karib kerabat serta orang-orang alim, lalu mengadakan bacaan-bacaan marbahani secara bersama-sama. Lalu sang bayi digendong berkeliling orang ramai itu, khususnya orang-orang alim dan pemuka-pemuka masyarakat masing-masing menggunakan sedikit rambut si bayi (sebagai simbolis mencukurnya). Di



1. Payung Agung



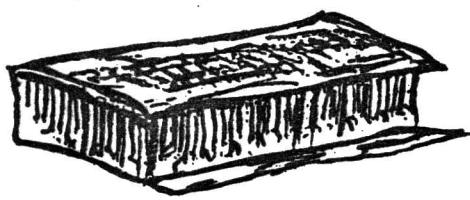
2. Tunggul



3. Alam



4. Tandu



5. Kalasan



6. Adadap

tengah-tengah lingkaran duduk tersebut terletak beberapa buah kembang telor (yang disebut adadap), yakni telor rebus matang yang telah diberi gincu war na-warni ditusuk dengan belahan-belahan kecil bambu disertai daun-daun kertas warna-warni pula, tangkai dari belahan-belahan kecil bambu itu pun dilapis bungkus pula dengan kertas. Lalu sejumlah kira-kira 20 telor tusuk tadi ditancapkan pada sepotong batang pisang, dan disusun rapi hingga menyerupai rangkaian kembang, dan diletakkan di dalam cerana tempat sirih atau di atas baki. Biasanya tersedia sekitar 5 buah kembang telor itu, yang merupakan kemerahan upacara tersebut.

Bila upacara telah berakhir, maka Telor tusuk tersebut lalu dibagi-bagikan kepada para hadirin untuk dibawa pulang kerumah masing-masing. Penulis sendiri telah sering diundang mengikuti upacara ini dan sering pula mendapat bagian telor tusuk yang berasal/diambil dari kembang telor (adadap) itu.

4.9. Siger : Mahkota Pengantin

Jenis-jenis pakaian adat daerah Lampung ini sebenarnya banyak pula macamnya, baik untuk pakaian pria maupun aneka ragam pakaian wanitanya. Namun yang menonjol dan sering dikemukakan di hadapan umum di dalam berbagai acara kesenian tari, nyanyian dan sebagainya (termasuk di dalam media elektronik TVRI) adalah "siger" yang banyak dipertontonkan.

Dari berbagai kesatuan adat daerah Lampung itu baik yang sistem Pepadun dan yang bukan, terdapat pula perbedaan-perbedaan yang mengandung motivasi sendiri-sendiri, bahkan untuk siger pun terdapat perlainannya.

Selanjutnya secara khusus dijelaskan mengenai:

- 1) *Siger*; mahkota pengantin wanita yang dipakai di kepala wanita pada upacara perkawinan, berbentuk melengkung seperti tanduk kerbau, dengan sejumlah 9 ruji (ujung-

ujung) tajam runcing, yang diantarai oleh 8 lekuk-lekuk melengkung kelihatan melaur lembut.

Siger ini terbuat dari lembaran kuningan (logam) dan dicelup dengan warna kuning emas. Tata tertib pemakaian siger yaitu : Selain tatkala menjadi pengantin, juga dipakai oleh gadis-gadis *menari* di balai adat, terutama oleh keluarga penyimbang, atau dipakai oleh gadis-gadis tatkala menyambut keda-tangan tamu-tamu agung.

Melihat bentuk-bentuk dan lengkung siger ini yang ber-motif *tanduk kerbau*, maka nampaknya benar budaya ini merupakan rangkaian dari sistem budaya Minangkabau sebagaimana yang diterangkan di dalam asal usul sejarah masyarakat daerah ini dahulu kala.

- 2) *Serenja Bulan*; merupakan puncak tertinggi dan terdepan pada siger. Sirenja bulan ini berbentuk mahkota kecil pula dengan 4 lengkung kecil dan 5 jeruji tajam, dan di puncaknya bertengger hiasan kembang bunga mekar (lihat gam-bar) . . .

Bahan pembuatannya juga sama seperti siger, yakni dari logam kuningan yang bertatah dan berlekuk-lekuk, dengan warna kuning emas dan berukir-ukir.

- 3) *Beringin Tumbuh*; hiasan pada siger yang berupa setangkai kembang dengan 2 atau 3 helai daun dengan bunga-bunga kecil yang dipasang pada ujung-ujung ruji yang tajam itu. Hiasan siger yang bercorak beringin tumbuh ini juga ter-buat dari logam kuningan yang berhias dan berukir-ukir dengan sepuhan warna kuning emas. Pada gambar terlam-pir . . . terlihat ada 4 *beringin tumbuh* yang terletak di atas 4 ruji yang runcing itu. Bunga-bunga kecil itu meru-pakan daya tarik tersendiri bagi perhatian para penonton.



P E N U T U P

Alhamdulillah, atas taufik dan hidayah-Nya-lah laporan penelitian ini dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, di tengah-tengah kesibukan harian yang sedang meningkat pula. Tentunya tulisan ini mengandung kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan seperti halnya tidak ada gading yang tak retak, namun sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh pimpinan proyek kami tetap berusaha melakukan penelitian dan penulisan ini dengan maksimal.

Hasilnya seperti yang telah tersaji ini, mudah-mudahan dapat pula merupakan tambahan bahan-bahan pengetahuan tentang sesuatu masyarakat, dan kiranya dapat juga terungkapkan mengenai sesuatu hal yang baru tentang segi-segi kemasyarakatan pada umumnya.

Terasa sekali perlunya penelitian ini dapat dilanjutkan pada masa-masa mendatang, agar dapat terungkap dan disajikan lagi secara lebih mendalam, lebih sempurna dan lebih bermutu, yang meskipun akan mengambil lokasi daerah tingkat II yang lain di dalam Propinsi ini pada tahun-tahun mendatang sebagai lanjutan dari penelitian ini.

Atas saran-saran dari para pembaca serta buah fikirannya yang positif dalam hal ini, lebih dulu kami menyampaikan terima kasih.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Taufik, "Di sekitar Sejarah Lokal di Indonesia", di dalam *Panel Sejarah Lokal* (Jakarta : Proyek IDSN, 1982/1983) hal. 1 – 46.
- "Beberapa aspek Penelitian Sejarah Lokal", didalam *Panel Sejarah Lokal* (Jakarta : Proyek IDSN, 1982/1983) hal. 47 – 68.
- Alfian, Ibrahim T. "Catatan Singkat tentang Konsep Sejarah Lokal, didalam *Panel Sejarah Lokal* (Jakarta : Proyek IDSN, 1982/1983) hal. 77 – 80.
- Berry, Brian J.L. and Howard Spodek, *Comparative Ecology of Large Indian Cities*, Economic Geography, 472 (Supplement, 1971).
- Broersma, R. *De Lampongsche Districten, 1916*.
- DPRD dan Pemda Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung, *Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung*, No. 6 Tahun 1979 (Tanjungkarang : Pemda Tk. II Tanjungkarang-Telukbetung 1979).
- DPRD dan Pemda Propinsi Lampung, *Penjelasan tentang Isi dan arti Lambang Daerah Propinsi Lampung-Sang*

- Bumi Ruwa Jurai* (Telukbetung : Pemda Propinsi Lampung 1971).
- De Graaf dan Stibbe, D.G. *Encyclopedie Van Nederlandsch Indie* Jilid II, 1918.
- Evers, Hands Dieter, *Sosiologi Perkotaan* (Jakarta : LP3ES, 1982).
- Gazalba, Sidi, *Pengantar Sejarah sebagai Ilmu* (Jakarta : Bhra-tara, 1966).
- Hadikusuma, Hilman *Sejarah dan Adat Istiadat Lampung* (Tanjungkarang-Telukbetung F.H. Unila, 1978).
- , *Persekutuan Hukum Adat Abung-Dalam Perkembangannya* dari masa ke masa, didalam majalah RISALAH ILMU PENGETAHUAN BUNGA RAMPAI ADAT BUDAYA No. 2 Tahun II (Telukbetung : F.H. Unila, 1974).
- Jungmans, K.H. dan H. Kotter, *Regional Development in Central and Southern Sumatera*, Volume II, Proyek Proposals.
- Koentjaraningrat, Redaksi : *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : P.T. Gramedia, 1977).
- , *Pengantar Anthropologi*, cetakan IV (Jakarta : Proyek IDSN, 1982).
- Kuntowijoyo, *Kota sebagai Bidang Kajian Sejarah* (Jakarta : Proyek IDSN, 1982).
- , *Beberapa Model Penulisan Sejarah Sosial* (Jakarta : Proyek IDSN, 1983/1984).
- Krausz, Ernest, *Religion as a key Variale-Agama sebagai Variabel Utama* (Jakarta : Proyek Penelitian Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Balitbang Agama Depag. 1976/1977.
- LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) *Masyarakat Indonesia* Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Jilid IV No. 1 – 2 (Jakarta : LIPI, 1977).

- , *Masyarakat Indonesia*, Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia, Jilid V No. 1 (Jakarta : LIPI 1978).
- , *Masyarakat Indonesia*, Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia, Jilid V No. 2 (Jakarta LIPI 1979).
- , *Masyarakat Indonesia*, Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia, Jilid V No. 1 (Jakarta LIPI 1979).
- Middleton, John, *The Religious System-Sistim Keagamaan* (Jakarta : Proyek Penelitian Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Balitbang Agama Depag RI, 1976/1977).
- Myrdal, Gunnar, *Bangsa-bangsa Kaya dan Miskin*, terjemahan Paul Sitohang (Jakarta : PT Gramedia, 1976).
- Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Kanwil Dep. P dan K Lampung, *Perkampungan di Kota sebagai wujud Pola Adaptasi*, (Bandar Lampung : Proyek IDSN Lampung, 1982/1983).
- Subagya, Rahmat, *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejawaan dan Agama* (Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1976).
- Subing, Abdullah A, *Kedatuan di Bukit Keratuan di Muara. Catatan Ringkas tentang Lampung Sebuway* (Bandar Lampung Penerbitan sendiri, 1983).
- Soejito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta : Fakultas Sospol UGM, 1976).
- Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cetakan ke LIMA (Jakarta ; Yayasan Penerbit Universitas Indonesia 1977).
- Team Penggali Hari Jadi Kota Tanjungkarang-Telukbetung, *Laporan Hasil Penelitian Team Penggali Hari Jadi Kota Tanjungkarang-Telukbetung* (Tanjungkarang-Telukbetung Pemda Kotamadya Daerah Tk. II Tanjungkarang-Telukbetung, 1982).
- Team Penelitian Fakultas Keguruan Universitas Lampung/ Unila, *Historiografi Daerah Lampung* (Tanjungkarang:

- Proyek Peningkatan/Pengembangan Perguruan Tinggi Unila 1975).
- Van Royen, J.W. *Adat Verband en Bestuurshervorming in Zuid Sumatera Kolonial Tijdschrift*, Tahun ke 21.
- Van Hoevell, W.R. *Tijdschrift Van Nederlands Indie*, Jilid II, Tahun ke 18.
- Wibowo, A.S. *Lampung pada Abad ke 17 Saduran dari Dagregister Expedisi I VOC ke Daerah Lampung 1982*, Jakarta : 1977.
- Wirth, Louis, *Urbanism as a Way of Life*, 44, 1938.
- Yusuf, Tayar, *Upacara Basapa di Ulakan* (Jakarta : Proyek Penelitian Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Balitbang Agama Depag. RI. 1976/1977).
- , *Lampung dan Problemnya di segi Pendidikan Tinggi* (Harian KOMPAS, Jakarta : 24 – 1 – 1976).
- , *Pemekaran Daerah Lampung dalam mempercepat Pembangunan Pedesaan* (Harian SUARA KARYA : 8 – 1 – 1976).
- , *Lampung di tengah-tengah kegiatan PELITA* (harian SUARA KARYA Jakarta : 19 dan 20 Januari 1976).
- , *Mengenal Sejarah Perjuangan Pahlawan Raden Intan* (Harian BHAYANGKARA Lampung : 30 Januari, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 25 Pebruari 1976).
- , *Agama di daerah Transmigrasi : Suatu Penelitian terhadap Pola Kehidupan dan Upacara Rituil Masyarakat Gedong Tatatan-Lampung Selatan 1983.*
- , *Penelitian Agama dan Pembangunan Daerah Lampung*. Makalah sebagai Pembahas Utama apda Seminar : Agama dan Pembangunan Daerah, Proyek Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Dep. Agama RI dan IAIN Rd. Intan 1983.

- , *Lampung dan Perluasan pusat-pusat Pembangunan*. (Harian Lampung Pos : Senin 28 Maret 1983).
- , *Lampung Menghadapi Pelita IV. Beberapa masalah dan Kemungkinan-kemungkinan* (Harian Lampung Pos, Kamis 21 April 1983).
- Man Hasan (Ketua Bappeda Propinsi Lampung), *Kebijakan Dalam Pembangunan Agama Empiris* (Bandar Lampung Bappeda Propinsi Lampung, 1983).
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta : Yayasan Penerbit UI, 1975).

Lampiran

DAFTAR RESPONDEN

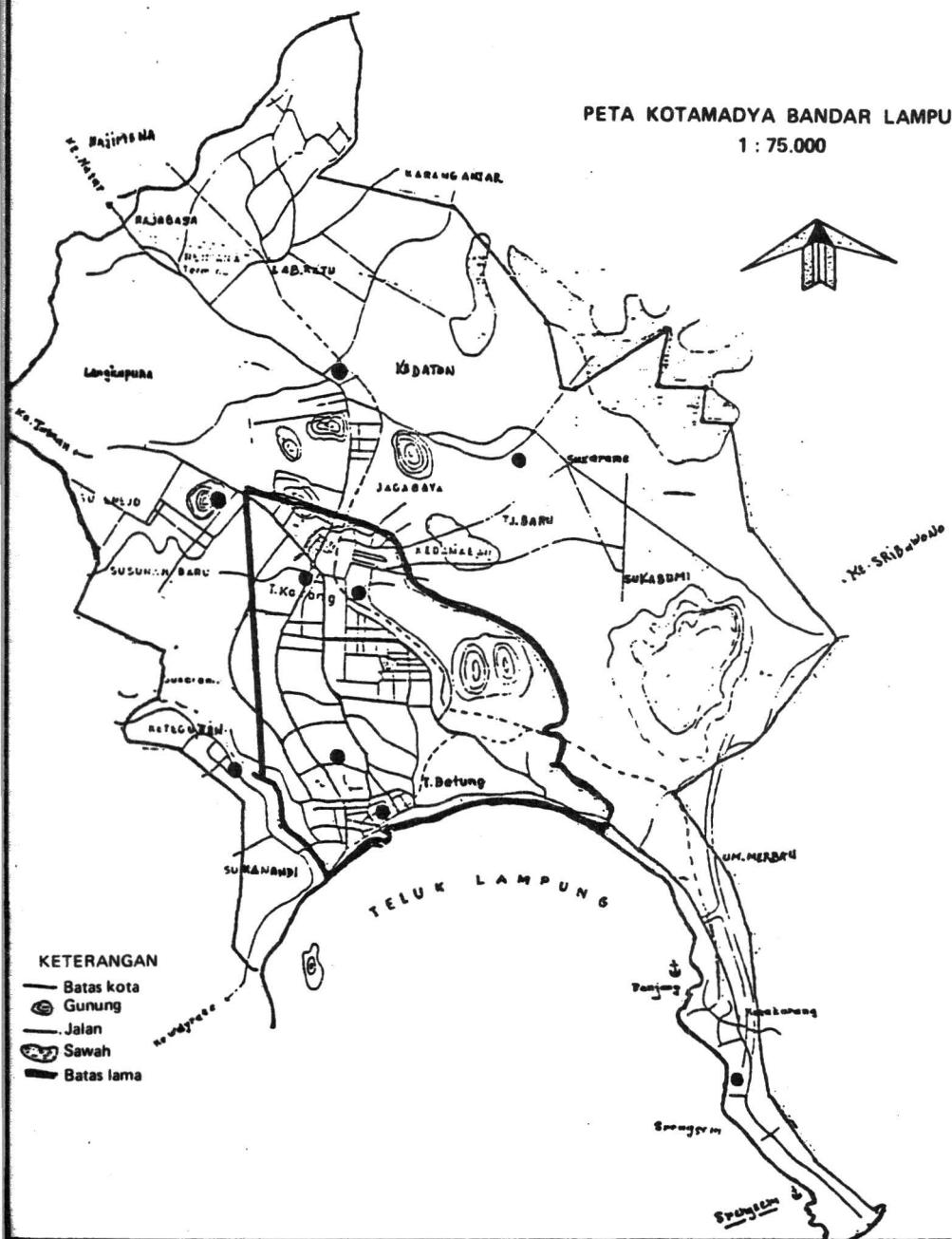
No.	Nama	Keterangan
1.	Drs. H. Subki E. Harun	Wakil Gubernur Lampung
2.	Alimuddin Umar SH	Sekwilda Propinsi Lampung
3.	H. Achmad Muchlisin	Pensiunan Gubernur Muda Lampung
4.	Drs. H. Zulkarnain Subing	Walikota Bandar Lampung.
5.	Drs. Suwardi Ramli	Kadir. Sospol Prop. Lampung.
6.	Drs. H.M. Syarifuddin	Sekwilda Kodya Bandar Lampung
7.	Hilman Hadikusuma SH	Lektor Kep. Universitas Lampung.
8.	Drs. Dulhai Tabahasa	Kabid PSK Kanwil Depdikbud bud Lampung
9.	Dra. Nonsari S	Bid. PSK. Kanwil Depdik-Lampung
10.	Ir. Slamet Fauzi Nurdin	Ketua Bappeda Kodya Bandar Lampung
11.	Drs. Samali Soleh	Kabag Pemerintahan Bandar Lampung

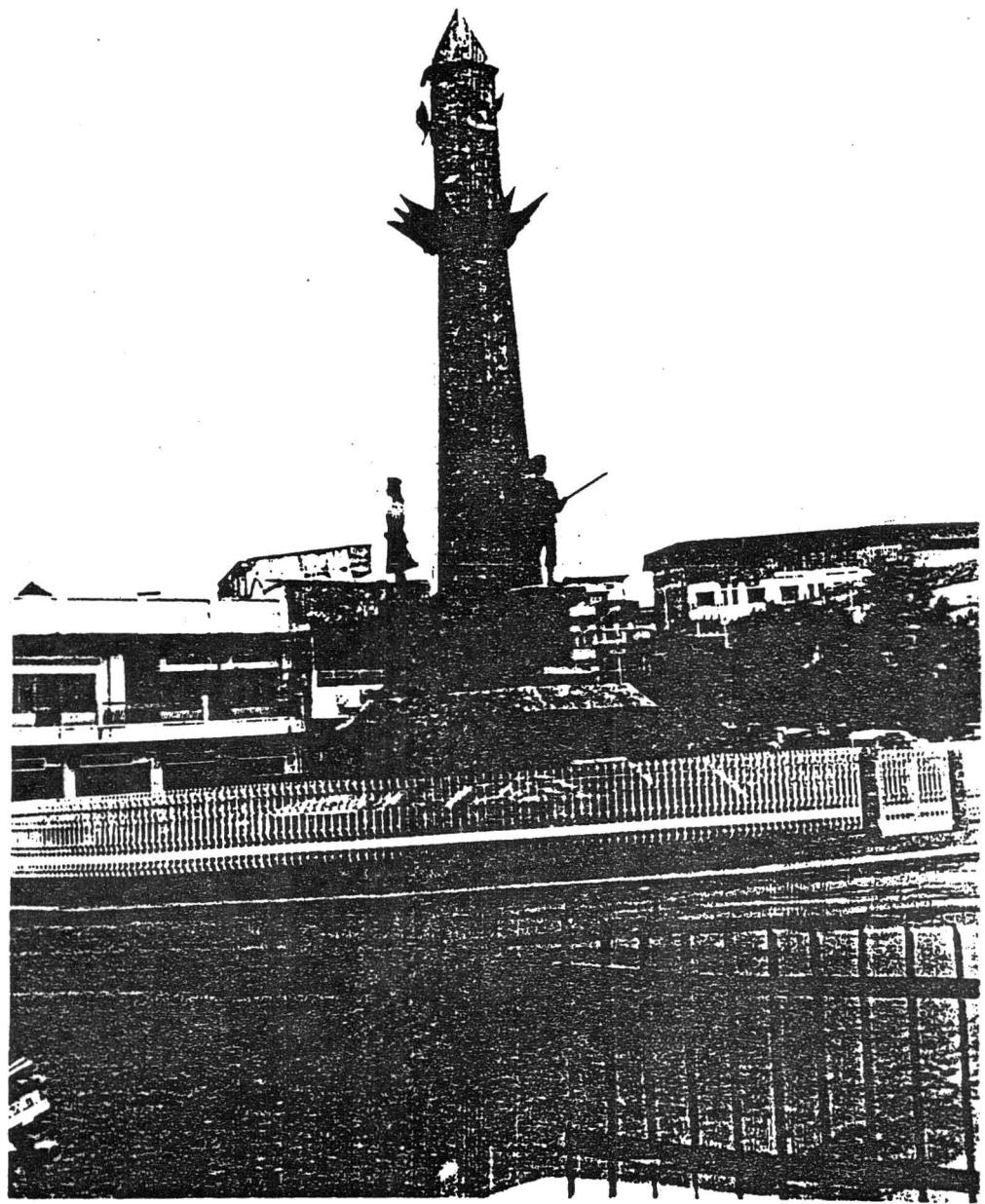
12. Tujo Astanto SH	Kabag Hukortala Kodya Bandar Lampung
13. Sazuli HD	Dinas PU Kodya Bandar Lampung
14. Drs. Hamdan Amid	Kabag Kesra Kodya Bandar Lampung
15. Arifin RI (Letkol Purn)	Ketua Leg. Veteran Prop. Lampung
16. H.M. Nurdin SH	Subdit. Sospol Prop. Lampung
17. Ahmad Sanusi PPA	Kepala Adat/Ang. DPRD Lampung Selatan
18. H. Abdullah	Sesepuh (Orang tua) Lampung
19. A. Kadir Tuan Raja	Kep. Kampung Kab. Ratu Bd. Lampung
20. K.H. Ali Tasim	Sesepuh Or. Banten/eks. Ket. DPRD Tjk
21. H.A. Rahman Kayo	Sesepuh (orang tua) Bengkulu.
22. Hirzun M. Carepaboka	Tokoh Muda Lampung.
23. Muharam Mustofa	Kasub. TU. Sospol Kodya Bd. Lampung
24. Drs. Alimuddin Alwi	Wk. Rektor I IAIN Rd. Intan.
25. M. Djuaini Zubair SH	Sekr. Al-Jamiah IAIN Rd. Intan
26. Ubaidillah A. Kadir SH	Cendekiawan/dosen IAIN Rd. Intan.
27. Dan lain-lain (banyak lagi)	yang tidak dapat disebut satu persatu, instansional/Perse-orangan

Research & Writer.

PETA KOTAMADYA BANDAR LAMPUNG

1 : 75.000





Bila anda mengunjungi Kotamadya "BANDAR LAMPUNG" maka di Pusat Kota akan terlihat berdirinya dengan megahnya "TUGU KEMERDEKAAN", yang merupakan MONAS-nya daerah ini.

SEJARAH SOSIAL DAERRAH

KOTAMADYA BANDAR LAMPUNG

SANG BUMI RUWA JURAI

